



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



KATA PENGANTAR

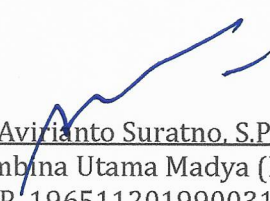
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2023. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196511201990031001

KATA PENGANTAR

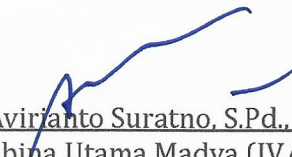
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi selama kurun waktu tahun 2023. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI


Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196511201990031001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI		
2	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA USAHA		
3	KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melaksanakan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2022-2024, yaitu sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan manajemen teknis yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendukung di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Kebijakan Transportasi. IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari 15 indikator yang merupakan penjabaran dari 5 sasaran kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

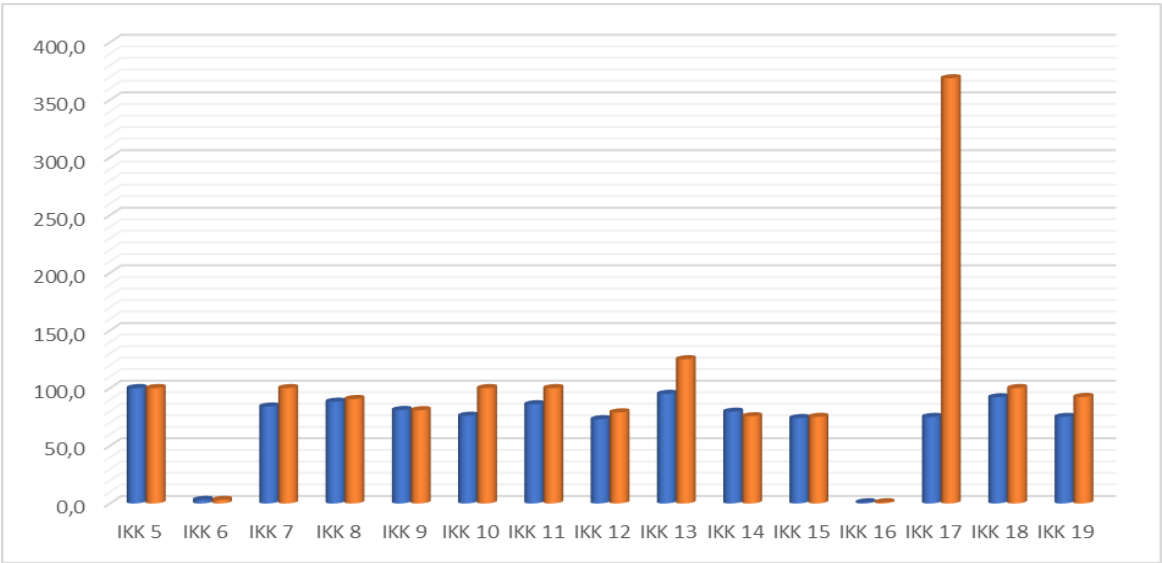
A. Pencapaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 cukup baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 135,26%. Dari 15 IKK, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target dan sisanya telah melampaui target kinerja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023. Gambaran kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dari tiap indikator selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. IKK 5 yaitu Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan ditargetkan pada PK tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 100,00. Nilai realisasi yang diperoleh sebesar 100,00 sehingga capaian kinerja untuk IKK 5 adalah sebesar 100,00%;
2. IKK 6 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi. Nilai realisasi berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen berdasarkan surat Nomor PS.302/4/6/ITJEN/2023 tentang Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kemenhub tanggal 14 Juni 2023, Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenhub Tahun 2022/2023 Nomor UM.006/22/1 Phb 2023 tanggal 27 Juni 2023, dan Hasil Evaluasi Penilaian oleh BPKP berdasarkan surat Direktur BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2023 ditargetkan mencapai level 3, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar 3 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%;
3. IKK 7 yaitu Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2023 sebesar 84 dan diperoleh realisasi sebesar 100 sehingga capaian kinerja IKK 7 yaitu sebesar 119,05%;
4. IKK 8 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 88,2 dan telah terealisasi sebesar 90,50 sehingga capaian kinerja untuk IKK 8 adalah sebesar 102,61%;

5. IKK 9 yaitu Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2023 sebesar 81. Nilai realisasi merupakan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun 2023 sesuai Surat Itjen Nomor PS.307/1/1/ITJEN/2023 Tanggal 30 Agustus 2023. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 80,80 sehingga capaian kinerja untuk IKK 9 adalah sebesar 99,75%;
6. IKK 10 yaitu Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi. Pada tahun 2023 ditargetkan memperoleh nilai sebesar 76 dan telah terealisasi sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target Triwulan IV diperoleh capaian kinerja sebesar 131,58%.
7. IKK 11 yaitu Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2023 dapat mencapai sebesar 86% dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 116,28%;
8. IKK 12 yaitu Indeks Penyelenggaraan Perkantoran pada tahun 2023 ditargetkan memperoleh nilai sebesar 73. Telah terealisasi sebesar 78,94 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,14%.
9. IKK 13 yaitu Tingkat pemenuhan NSPK Badan Kebijakan Transportasi pada PK tahun 2023 ditargetkan memperoleh nilai sebesar 95% dan diperoleh realisasi sebesar 125 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 131,58%;
10. IKK 14 yaitu Indeks Kelembagaan ditargetkan pada PK tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 79,50. Telah terealisasi sebesar 75,59 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 95,09%. Penilaian Indeks Kelembagaan berdasarkan Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Seharusnya BKT baru akan melaksanakan evaluasi kelembagaan di tahun 2025, tetapi pada tahun 2023 Kementerian Perhubungan perlu melaksanakan evaluasi kelembagaan, sehingga organisasi dibawahnya juga diarahkan untuk melaksanakan Evaluasi Kelembagaan;
11. IKK 15 yaitu Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan memperoleh nilai sebesar 74, sampai dengan akhir tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 75,04 sehingga capaian kinerja untuk IKK 15 adalah sebesar 101,41%.
12. IKK 16 yaitu Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2023 memperoleh nilai indeks sebesar 0,96 telah terealisasi di tahun 2023 sebesar 0,96 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%.
13. IKK 17 yaitu Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan ditargetkan pada PK tahun 2023 memperoleh sebesar 75, telah terealisasi sebesar 368,70 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 491,60%;
14. IKK 18 yaitu Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data ditergetkan pada PK tahun 2023 sebesar 92 dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 108,70%;
15. IKK 19 yaitu Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2023 dapat mencapai nilai 75 dan telah terealisasi sebesar 92,32 maka capaian kinerja diperoleh sebesar 123,09%.

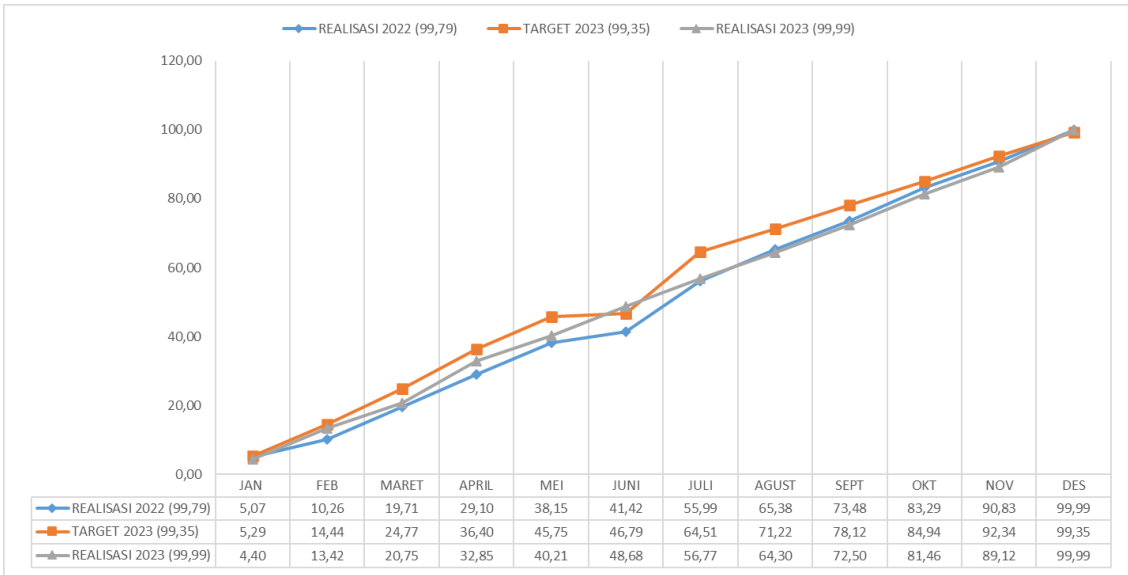
Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

B. Kinerja Anggaran

Secara umum realisasi serapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 sangat baik. Sisa belanja barang berasal dari sisa perjalanan dan honor jasa profesi serta sisa belanja pegawai dikarenakan adanya kelebihan perhitungan gaji dan tunjangan kinerja untuk pegawai disebabkan adanya mutasi pegawai dan pensiun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berikut di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA	2
I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	3
I.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 – 2024.....	6
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023	9
II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	15
III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	15
III.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	65
III.4. REALISASI ANGGARAN	74
BAB IV PENUTUP	78
IV.1 KESIMPULAN	78
IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT	78
L A M P I R A N	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024.....	8
Tabel 3. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.....	11
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023	16
Tabel 3. 4 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi.....	18
Tabel 3. 5 Jadwal pelaksanaan kegiatan agenda mapping tahun 2023.....	19
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	20
Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan Tahun 2023.....	21
Tabel 3. 8 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel.....	21
Tabel 3. 9 Tingkatan Level Maturitas SPIP.....	22
Tabel 3. 10 Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan di Lingkungan Unit Eselon I Kementerian Perhubungan.....	23
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	24
Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023.....	24
Tabel 3. 13 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan.....	25
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 15 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan BKT Tahun 2023.....	27
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	29
Tabel 3. 17 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2023.....	30
Tabel 3. 18 Interpretasi Penilaian Hasil Evaluasi SPIP	31
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	32
Tabel 3. 20 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Nilai SAKIP BKT Tahun 2023.....	33
Tabel 3. 21 Rincian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2023	33
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 23 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2023	35

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	37
Tabel 3. 25 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT Tahun 2023	38
Tabel 3. 26 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus <i>Slovin</i> dan Realisasi Responden.....	39
Tabel 3. 27 Skor Skala <i>Likert</i>	39
Tabel 3. 28 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala <i>Likert</i>	40
Tabel 3. 29 Interval Interpretasi Skor.....	41
Tabel 3. 30 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian.....	41
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024	41
Tabel 3. 32 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2023	42
Tabel 3. 33 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	43
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	44
Tabel 3. 35 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	45
Tabel 3. 36 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	45
Tabel 3. 37 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi.....	46
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024.....	48
Tabel 3. 39 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2023	49
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	51
Tabel 3. 41 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2023	52
Tabel 3. 42 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi.....	53
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024	53
Tabel 3. 44 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2023	54
Tabel 3. 45 Rekapitulasi Data Pemanfaatan <i>E-library</i> Perpustakaan Kementerian Perhubungan	56
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024	56
Tabel 3. 47 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2023	57

Tabel 3. 48 Daftar Aplikasi dan Data Tahun 2023	58
Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	61
Tabel 3. 50 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2023	62
Tabel 3. 51 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi.....	63
Tabel 3. 52 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	63
Tabel 3. 53 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	64
Tabel 3. 54 Target dan Realisasi Capaian Rincian <i>Output</i> Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	66
Tabel 3. 55 Tingkat Penyerapan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 per Bulan	67
Tabel 3. 56 Perhitungan Skalia Efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023	68
Tabel 3. 57 Rencana Penarikan Dana Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 per Bulan	69
Tabel 3. 58 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2023.....	70
Tabel 3. 59 Nilai Variabel Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	71
Tabel 3. 60 Perkembangan Anggaran Tahun 2018-2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.....	74
Tabel 3. 61 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2023	76
Tabel 3. 62 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2020	76
Tabel 3. 63 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	iv
Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	iv
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.....	1
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III	2
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	2
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	3
Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.....	10
Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	13
Gambar 2. 3 Perjanjian Kerja Revisi I Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	14
Gambar 3. 1 Tempat pelaksanaan kegiatan agenda mapping tahun 2023	19
Gambar 3. 2 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	26
Gambar 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023	28
Gambar 3. 4 Nilai IKPA Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	29
Gambar 3. 5 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi.....	51
Gambar 3. 6 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.....	65
Gambar 3. 7 Penerimaan Penghargaan Anugerah Standar Layanan Informasi Publik 2023 oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Bapak Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si	72
Gambar 3. 8 Peringkat 3 Besar Penganugerahan SAKIP <i>Award</i> 2023 Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan	73
Gambar 3. 9 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2019 – 2023.....	74
Gambar 3. 10 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2019-2023	74
Gambar 3. 11 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.....	75

LAMPIRAN

Lampiran 1	80
Lampiran 2	82
Lampiran 3	84

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean government and good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada Permen PAN-RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Capaian kinerja untuk beberapa Indikator yang masih terkait fungsi penelitian dan pengembangan telah dihilangkan sehubungan dengan adanya peralihan anggaran maupun tugas dan fungsi kelitbangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per bulan Agustus 2022.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 – 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BLT 65 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-SBKT 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan Badan Kebijakan Transportasi maupun dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan tetap terintegrasi.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan bagian integral dari Badan Kebijakan Transportasi dalam lingkup Kementerian Perhubungan. Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berpedoman pada Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2022 – 2024 dan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2022 – 2024

yang telah disusun dan dijadikan dasar analisa capaian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perhubungan. Karenanya maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi selaku Pemberi Mandat atas pencapaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan manajemen teknisnya dalam penyelenggaraan program kegiatan;
- c. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

I.2.1 Tugas

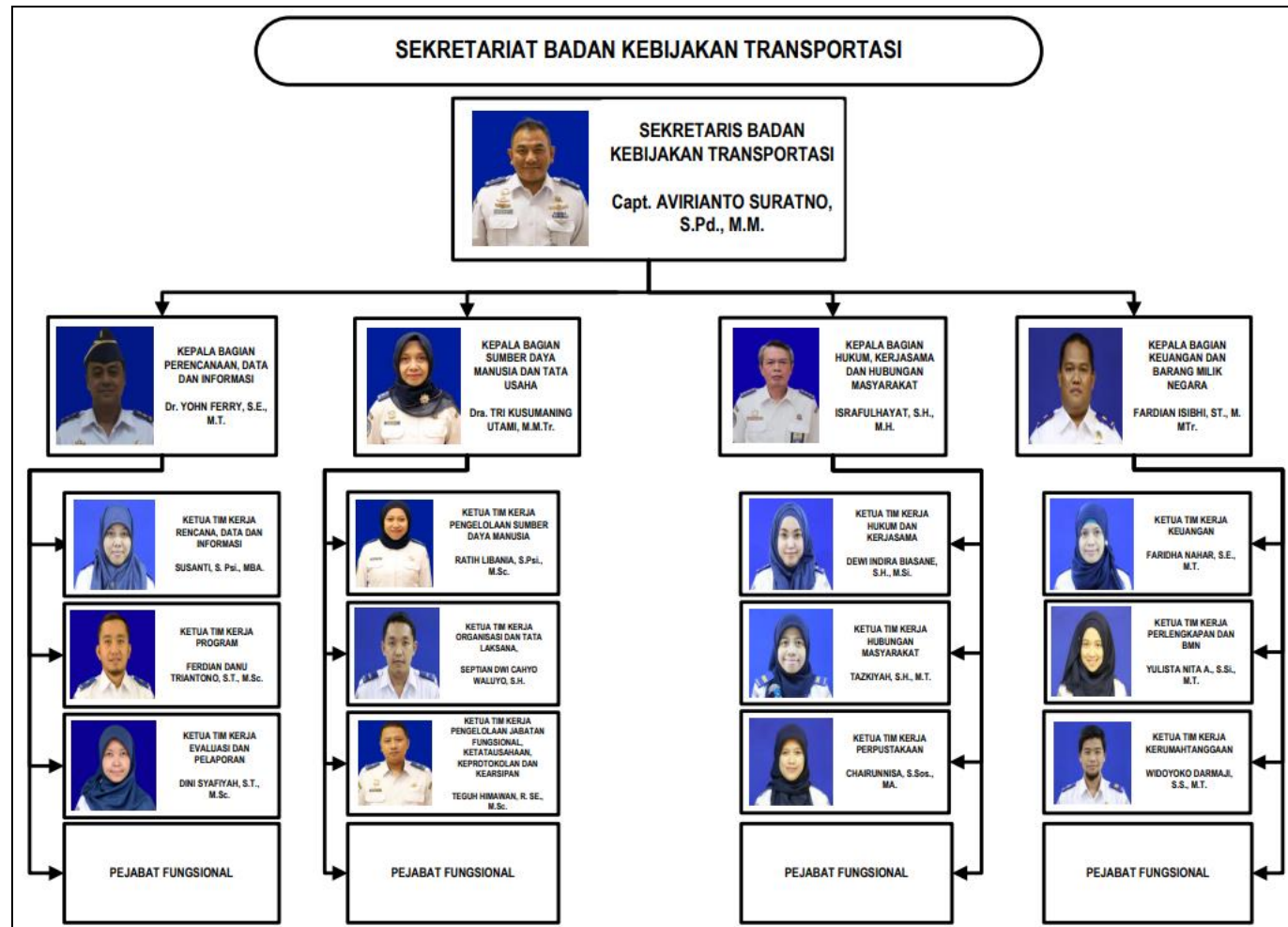
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Sekretaris Badan, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

I.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Rencana, Program, Anggaran, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- b. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatausahaan, Serta Pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Analisis Kebijakan dan Kepustakaan;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Hukum, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Publikasi, Serta Dokumentasi Dan Kepustakaan; dan
- d. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta Kerumahtanggaan.

Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melingkupi 4 (empat) unit kerja Eselon III yang terdiri dari (1) Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; (2) Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; (3) Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan (4) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Apabila digambarkan maka struktur organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan PM 17 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



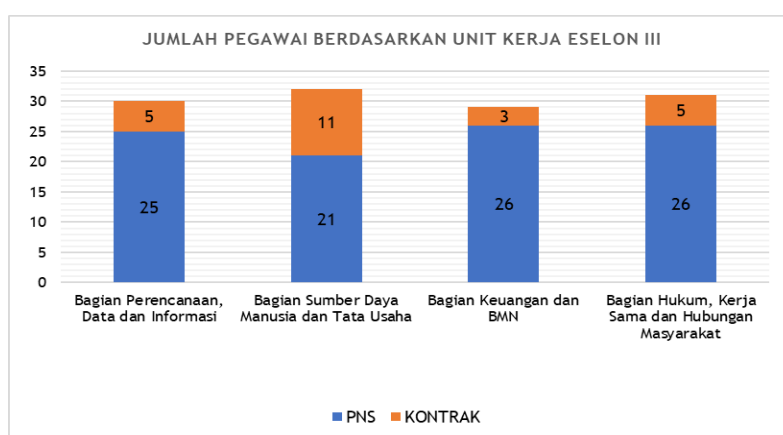
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Komposisi pegawai PNS Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan unit kerja eselon III, tingkat pendidikan serta golongan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2023 yaitu 122 pegawai yang terdiri dari 98 orang PNS dan 24 orang Pegawai Kontrak. Seluruh pegawai ini tersebar pada empat unit kerja eselon III. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan unit kerja ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut:

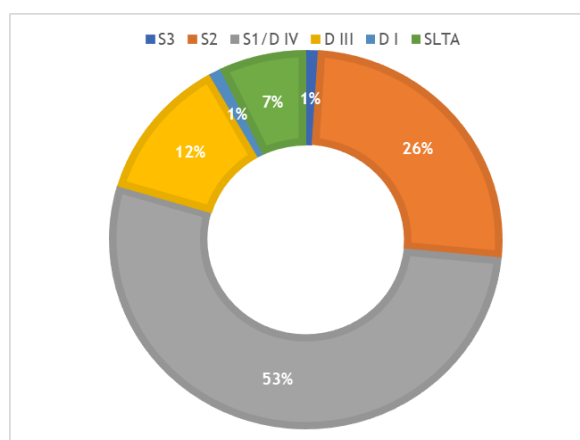


Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Januari 2024

Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

2. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menurut tingkat pendidikan, yaitu S1 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 25 orang, S1/DIV sebanyak 52 orang, DIII sebanyak 9 orang, DI sebanyak 12 orang dan SLTA sebanyak 7 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.

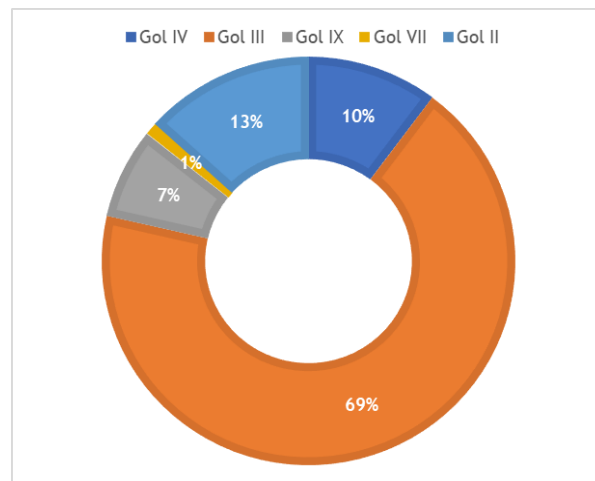


Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Januari 2024

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Berdasarkan Golongan

Sedangkan berdasarkan golongan tercatat pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 67 orang, Golongan IX sebanyak 7 orang, Golongan VII sebanyak 1 orang, dan Golongan II sebanyak 13 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar 1.4. berikut.



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Januari 2024

Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Pada tahun 2023, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Tugas utama yang sebelumnya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perhubungan dengan output hasil penelitian berubah menjadi menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan masukan penyempurnaan kebijakan transportasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Perubahan tugas pokok dan fungsi ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2023 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi ke depan untuk kurun waktu 2020-2024. Adapun peran Badan Kebijakan Transportasi ke depannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi meliputi penjabaran peran Badan Kebijakan Transportasi terkait dengan fungsi pelayanan Badan Kebijakan Transportasi. Peran Badan Kebijakan Transportasi kedepannya diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai:

1. Lembaga yang menyusun kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Lembaga pelaksana analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;

3. Lembaga pelaksana analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
4. Lembaga pengelola manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
5. Lembaga pelaksana pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
6. Lembaga pelaksana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Lembaga pelaksana administrasi Badan Kebijakan Transportasi; dan
8. Lembaga pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi meliputi kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Perubahan organisasi Badan Litbang Perhubungan menjadi BKT berimplikasi langsung pada kebutuhan perubahan seluruh perangkat pendukung organisasi, meliputi aspek pola pengorganisasian, aspek sumber daya manusia, aspek hubungan kelembagaan internal dan eksternal serta aspek penganggaran. Pada proses restrukturisasi organisasi, pola pengorganisasian diwujudkan dalam bentuk perangkat kelembagaan dan tata laksana yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mengatur hubungan kerja (koordinasi, kolaborasi dan sinergi) antar fungsi unit organisasi atau unit kerja. Perumusan tata laksana, yaitu dalam bentuk proses bisnis meliputi hubungan tata acara kerja, kesepakatan operasional kerja (sistem kerja) dan Standar Prosedur Operasional (SOP).

Sementara itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi lebih bersifat internal dan bersifat dukungan manajemen, yaitu meliputi kegiatan pokok penyiapan rencana, program, anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data dan sistem informasi, penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatausahaan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepustakaan, penyiapan pelaksanaan urusan hukum, kerjasama, hubungan masyarakat, publikasi, serta dokumentasi dan kepustakaan; serta penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta kerumahtanggaan.

Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan capaian dari kegiatan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan dan pengembangan perhubungan.

Dalam hal ini, peran strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai koordinator pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan khususnya sumber daya manusia meliputi tenaga fungsional tertentu serta kegiatan penunjang yang terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung rekomendasi kebijakan.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

BAB II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023, yaitu terdiri dari:

a. Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun 2023, pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

BAB IV – Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 – 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan tersebut, Rencana strategis (Renstra) Badan Kebijakan Transportasi telah disusun dan disahkan pada bulan Desember tahun 2022.

Transformasi Badan Litbang menjadi BKT mendasari penyempurnaan/penyesuaian dalam melakukan evaluasi/Reviu Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020-2024 menjadi Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 yang dipergunakan sebagai pedoman dan acuan perencanaan bagi Unit Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi untuk (1) penyusunan dan penetapan rencana lima tahun (Renstra); (2) penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL); (3) pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; dan (4) pemantauan dan evaluasi di bidang perumusan rekomendasi kebijakan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) selama lima tahun merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan digunakan oleh para pemangku jabatan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024 merupakan turunan dari Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024.

Berikut ini merupakan gambaran visi dan misi serta tujuan dari Badan Kebijakan Transportasi sebagai organisasi baru yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Nantinya, dalam menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi akan mengacu kepada visi dan misi serta tujuan dari Badan Kebijakan Transportasi ini yang disusun berdasarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Berikut ini Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi dalam dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi:

VISI

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

MISI

Sebagai penjabaran visi tersebut maka misi Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan **harmonisasi** kebijakan transportasi secara **holistik, integratif, tematik, spasial (HITS)**;
2. Meningkatkan **kualitas** rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge based policy*);
3. Meningkatkan **peran serta pemangku kepentingan** dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
4. Membangun **bisnis proses** yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi;
5. **Penguatan** SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

TUJUAN

1. Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi;
2. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024 dan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024. Pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran kegiatannya, setiap sasaran yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif;
2. Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi;
4. Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi;
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi.

Secara rinci penjabaran indikator kinerja berikut targetnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan	%	100	100	100
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3
IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	82	84	85
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	86,2	88,2	90,2
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	80	81	82
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	75	76	77
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	85	86	87
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	72	73	74
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	90	95	100
IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79	79,5	80
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	73	74	75
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,92	0,96	1
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	70	75	75
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	92	93
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	70	75	75

Selanjutnya target kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun tersebut.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengerahan sumber daya, terutama anggaran.

Pada tahun 2023, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp75.642.991.000 dari total pagu alokasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi Rp164.691.139.000,-. Pada bulan November dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2023 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 menjadi sebesar Rp74.854.518.000,-. Setelah pengesahan realokasi anggaran ke Babun, DIPA akhir Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp74.854.518.000,-. Rincian anggaran meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 34.805.083.000,-, belanja barang Rp 36.277.009.000,-, dan belanja modal sebesar Rp 3.772.426.000,-. Dalam hal ini, dokumen RKT Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2023 sebagaimana disajikan pada **Lampiran III** menjadi dasar penentuan alokasi anggaran tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2023

RESUME RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
TAHUN 2023

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	KODE	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	2023
SP 1	Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			
		IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	Cukup
		IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)	%	85
		IKP 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	Nilai Indeks RB BKT	Indeks	80
SK 2	Terselenggaranya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum BKT	IKK 6	Tingkat pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95
SK 4	Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 7	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 8	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84
		IKK 9	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2
		IKK 10	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86
		IKK 11	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
SK 5	Meningkatnya kapabilitas organisasi dan SDM BKT	IKK 13	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5
		IKK 14	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74
		IKK 15	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT Perhubungan	IKK 16	Tingkat penggunaan layanan perpustakaan	Nilai	75
		IKK 17	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

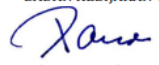
Jakarta, 2022
 SEKRETARIS
 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



PANDU YUNIARTO
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19650606 198803 1 001

ii

Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2023					
					
KATA PENGANTAR					
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan unit kerja Eselon II Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, setiap tahun menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang akan menjadi acuan dan tuntunan bagi setiap penanggung jawab kegiatan kesekretariatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.					
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan dan strategis untuk mencapai tujuan kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.					
Disamping hal tersebut, Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 juga mengakomodir perubahan kebijakan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.					
Semoga dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 diharapkan dapat memandu tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.					
Jakarta, 2022 SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  PANDU YUNianto Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650606 198803 1 001					
NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Di Konsep	Nadia Milla Hanifah	Perencana Pertama	10-10-2022	
2.	Di Periksa	Ferdian Danu Triantono	Perencana Muda	10-10-2022	
3.	Di Setujui	Imam Prasetyo	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	10-10-2022	
i					

Pada tahun 2023 dengan adanya restrukturisasi program Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2022 berimplikasi terhadap restrukturisasi output dan kegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut. Restrukturisasi output ini pada tahun 2023 sudah mulai diakomodir dengan adanya penyusunan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA RENJA) melalui penyederhanaan output dimana beberapa output lama dikelompokkan menjadi output baru. Secara rinci pemetaan kegiatan output baru dan output lama dapat dilihat Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 3. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1. Formulasi Kebijakan Transportasi	1. Koordinasi	1. Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan	12.358.412.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.284.026.000
3. Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	3. Layanan Dukungan Manajemen Internal	3. Layanan BMN	897.562.000
		4. Layanan Umum	1.701.934.000
		5. Layanan Perkantoran	52.239.312.000
	4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6. Layanan Sarana Internal	2.575.586.000
	5. Layanan Manajemen Kinerja Internal	7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	767.651.000
		8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	885.194.000
		9. Layanan Manajemen Keuangan	1.081.390.000
		10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	117.642.000
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan	6. Layanan Dukungan Manajemen Internal	11. Layanan Hubungan Masyarakat	432.578.000
5. Legislasi dan Litigasi Kebijakan	7. Layanan Dukungan Manajemen Internal	12. Layanan Hukum	301.704.000
TOTAL			75.642.991.000

II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan target kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang akan dicapai pada tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak kerja antara Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Pada tahun 2023, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun sebanyak 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja awal yang disusun pada bulan Januari 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp75.642.991.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.;
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja revisi I yang disusun pada bulan November 2023 dikarenakan adanya pergantian Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta adanya *refocusing* anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp74.474.737.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Revisi I inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7 Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	95
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	79,5
		IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	74

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
		IKK 16 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75
		IKK 18 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 19 Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

KEGIATAN

ANGGARAN

Program Infrastruktur Konektivitas

1. Formulasi Kebijakan Transportasi Rp12.358.412.000,00

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan Rp2.284.026.000,00

2. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perumus Kebijakan Rp60.266.271.000,00

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan Rp432.578.000,00

4. Legislasi dan Litigasi Kebijakan Rp301.704.000,00

Disetujui,

Jakarta, Januari 2023

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Sekretaris
Badan Kebijakan Transportasi

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

PANDU YUNianto, ATd., M.Eng. Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7 Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
		IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	95
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	79,5
		IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	74

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
		IKK 16 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75
		IKK 18 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 19 Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

KEGIATAN

ANGGARAN

Program Infrastruktur Konektivitas

1. Formulasi Kebijakan Transportasi Rp. 11.190.158.000,00

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan Rp. 2.284.026.000,00

2. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perumus Kebijakan Rp. 60.266.271.000,00

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan Rp. 432.578.000,00

4. Legislasi dan Litigasi Kebijakan Rp. 301.704.000,00

Disetujui,

Jakarta, November 2023

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Sekretaris
Badan Kebijakan Transportasi


Dr. ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19790629 199802 1 002


PANDU YUNianto, ATD., M.Eng. Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Gambar 2. 3 Perjanjian Kerja Revisi I Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yaitu *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian realisasi target *output* kegiatan, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap bulan. Di samping Laporan Rencana Aksi Kinerja, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan monitoring capaian target dan proses output/kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi e-monev penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3> dalam bentuk monitoring realisasi target anggaran dan output kegiatan.

III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi I Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023 dengan realisasinya.

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target PK tahun 2023 dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023;
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya;
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target ditahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024.

III.2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai upaya pencapaian program Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang dijabarkan menjadi 15 indikator kinerja kegiatan. Secara rata-rata capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 adalah sebesar 135,26% yang dihitung dari capaian seluruh indikator Sekretariat Badan Libang Perhubungan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan	%	100	100	100,00%
2	SK 3 Meningkatkan Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	100,00%
		IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84	100	119,05%
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2	90,50	102,61%
		IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	80,80	99,75%
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	76	100	131,58%
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86	100	116,28%
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	78,94	108,14%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
3	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95	125	131,58%
4	SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5	75,59	95,08%
		IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74	75,04	101,40%
		IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,96	100,00%
5	SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	368,70	491,60%
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	100	108,70%
		IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	92,32	123,09%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							135,26

Secara rinci, analisis realisasi capaian dan target tahun 2023 pada masing-masing sasaran dan indikator disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 2: Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif

Pencapaian sasaran kegiatan dua diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3. 4 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2023	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	100,00	100,00%

IKK 5: Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan

Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan diselenggarakan melalui koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif. Koordinasi perumusan kebijakan meliputi koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, dan koordinasi monitoring evaluasi.

Persentase penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif pada tahun berjalan dihitung berdasarkan:

Koordinasi perencanaan (a)	Koordinasi perencanaan kebijakan dan pemetaan isu strategis; dilakukan minimal 2 kali setahun bersama dengan <i>stakeholder</i> terkait (agenda mapping dilaksanakan per semester)
Koordinasi pelaksanaan (b)	Koordinasi pelaksanaan kebijakan, mencakup kegiatan konsultasi publik, harmonisasi rancangan kebijakan dan sosialisasi kebijakan, dilakukan minimal 5 kali setahun bersama dengan <i>stakeholder</i> terkait (2x konsultasi publik dan sosialisasi rancangan kebijakan) (3 kali harmonisasi rancangan regulasi per 4 bulan yang telah siap ditetapkan)
Koordinasi monitoring evaluasi (c)	Koordinasi monitoring, kendali mutu dan evaluasi implementasi kebijakan, dilakukan minimal 2 kali setahun, sebagai monitoring dan evaluasi saat rumusan kebijakan telah di deliver (diawal dan akhir tahun)
Total koordinasi (d)	Minimal 9 x (angka minimal pembagi)

Pengukuran capaian kinerja Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan diperoleh berdasarkan jumlah koordinasi yang dilaksanakan meliputi koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan koordinasi monitoring evaluasi dibagi dengan total koordinasi (minimal 9 kali dalam setahun).

Dalam pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan pengidentifikasian kegiatan strategis, penajaman isu strategis,

dan koordinasi perencanaan kebijakan untuk menjangring isu strategis aktual pada 26 Provinsi. Kegiatan ini telah menjangring 1.095 aspirasi melibatkan BKT sebagai *unit lead*, subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan, kementerian terkait, pemerintah daerah, user, operator, regulator, serta Lembaga legislatif. Berikut ini merupakan sebaran pelaksanaan agenda *mapping*.



Gambar 3. 1 Tempat pelaksanaan kegiatan agenda mapping tahun 2023

Kegiatan Agenda *Mapping* dibagi menjadi dua semester yang dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Jadwal pelaksanaan kegiatan agenda mapping tahun 2023

NO	LOKASI	UNIT KERJA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Bali	Sarana	2-4 Februari
2	Sumatera Utara	Sarana	21-23 Februari
3	Sulawesi Tenggara	Sarana	15-17 Februari
4	Kalimantan Timur	Sarana	4-6 Oktober
5	Kalimantan Selatan	PTIM	11-13 Januari
6	Sulawesi Utara	PTIM	15-17 Februari
7	Riau *	PTIM	3-5 Agustus
8	Kep. Riau *	PTIM	3-5 Agustus
9	Lampung *	PTIM	14-16 Agustus
10	Bengkulu *	PTIM	14-16 Agustus
11	Kalimantan Tengah	PTIM	20-22 September
12	Sulawesi Tengah *	PTIM	19-21 Oktober
13	Sulawesi Barat *	PTIM	19-21 Oktober
14	Nusa Tenggara Timur	LLATP	19-21 Januari
15	Papua Barat	LLATP	8-11 Februari
16	Jambi	LLTP	31 Juli – 2 Agustus
17	Kalimantan Utara	LLATP	25-28 September
18	Maluku Utara	LLATP	5-8 September
19	Kalimantan Barat	LLATP	3-6 Oktober
20	Jawa Tengah	KKT	20-22 Februari

NO	LOKASI	UNIT KERJA	WAKTU PELAKSANAAN
21	Sumatera Selatan	KKT	15-17 Maret
22	Aceh	KKT	25-27 Juli
23	Gorontalo	KKT	16-18 Oktober
24	Jawa Timur	KKT	14-16 Agustus
25	Maluku	KKT	5-7 September
26	DI Yogyakarta	KKT	26-28 September

Ket: * Forum diskusi yang diikuti oleh perwakilan stakeholder 2 (dua) provinsi.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan dengan target 2023, realisasi tahun 2022, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	100	-	-	100

Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga belum ada realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 5 pada tahun 2023 yaitu sebesar 100 telah mencapai target sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,00%**. Realisasi sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 5, antara lain:

- Komitmen Pimpinan dan seluruh staf yang terlibat dalam pelaksanaan inventarisasi isu-isu transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian;
- Koordinasi secara masif pada seluruh tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, maupun tahap perumusan hasil;
- Partisipasi aktif dari stakeholder yang berkontribusi dalam penyampaian isu dan permasalahan aktual di setiap daerah.

Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan merupakan indikator baru setelah adanya transformasi kelembagaan maka hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepan yaitu standarisasi format output kegiatan, pemetaan secara lebih detail terkait rencana kegiatan, lokasi, maupun penanggung jawab agar isu dan permasalahan aktual yang terjadi di setiap daerah dapat dijangkau secara optimal.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 5 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp719.377.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp719.373.818,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.182,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada Tahun Berjalan		719.377.000	719.373.818	3.182	99,9996%
	Program Infrastruktur Konektivitas		719.377.000	719.373.818	3.182	99,9996%
	Koordinasi Pemetaan Isu Strategis Kebijakan Transportasi	1 Laporan	719.377.000	719.373.818	3.182	99,9996%

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel

Pencapaian sasaran kegiatan tiga diwujudkan melalui 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2023	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	100,00
IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84	100	119,05
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2	90,50	102,61
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	80,80	99,75
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	76	100,00	131,58
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86	100	116,28
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	78,94	108,14

IKK 6: Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Kementerian. Pedoman tingkat maturitas SPIP ditetapkan melalui peraturan kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tingkatan level maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Tingkatan Level Maturitas SPIP

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
0	Belum ada (dalam penataan)	$0 < \text{skor} < 1.0$	Belum memiliki kebijakan dan prosedur.
1	Rintisan	$1.0 < \text{Skor} < 2.0$	Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis. Namun masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan Pemantauan.
2	Berkembang	$2.0 < \text{Skor} < 3.0$	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
3	Terdefinisi	$3.0 < \text{Skor} < 4.0$	Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	$4.0 < \text{Skor} < 4.5$	Ada Praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	Optimum	$4.5 < \text{Skor} < 5$	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan. Terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2023 meliputi aspek perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil. Hasil penilaian SPIP terintegrasi terdiri dari Nilai Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK). Penilaian mandiri dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Setelah dilakukan penilaian mandiri, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan akan melakukan penjaminan kualitas terhadap nilai PM. Selanjutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas untuk melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan Penjaminan Kualitas maturitas SPIP Tahun 2023 terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan di Lingkungan Unit Eselon I Kementerian Perhubungan

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor		
			Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi BPKP
1.	Penetapan Tujuan	5	5,000	5,000	4,500
2.	Struktur dan Proses	2	0,571	0,571	0,501
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,915	0,915	0,900
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,486	3,486	3,200
	Nilai MRI	3	3,06	3,06	2,770
	Nilai IEPK	2	1,50	1,50	1,460
	Kapabilitas APIP	3	-	3	3

Simpulan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor PS.302/4/6/ITJEN/2023 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 14 Juni 2023 telah memenuhi target tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu pada level 3 (terdefinisi). Hasil evaluasi menunjukkan secara umum penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 dan hasil evaluasi menunjukkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,486** (level 3).

Nilai realisasi tahun 2023 sesuai Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM.006/22/1Phb 2023 tentang Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan tanggal 27 Juni 2023 merupakan skor hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *Quality Assurance* (QA) dan Pembinaan SPIP Kemenhub.

Hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas selanjutnya dilakukan evaluasi oleh BPK sehingga hasil Evaluasi Penilaian berdasarkan surat Direktur BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan memperoleh nilai Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar **3,200**. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh capaian kinerja untuk IKK 6 adalah sebesar **100%**.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2vtahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 6 pada tahun 2023 yaitu sebesar 3 telah mencapai target sebesar 3 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,00%**. Realisasi sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 6 yaitu Badan Kebijakan Transportasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta partisipasi aktif pimpinan Badan Kebijakan Transportasi dalam pelaksanaan monitoring secara berkala.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum adalah perlu melakukan finalisasi penyusunan dan diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya. Evaluasi dan monitoring secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian yang terintegrasi dalam kegiatan. Selain itu, perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 6 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp357.854.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp357.852.000,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.000,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi		357.854.000	357.852.000	2.000	99,9994%
	Program Infrastruktur Konektivitas		357.854.000	357.852.000	2.000	99,9994%
	a. Koordinasi Pengendalian Internal Perumusan Kebijakan	2 Laporan	357.854.000	357.852.000	2.000	99,9994%

IKK 7: Indeks Perencanaan BKT

Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

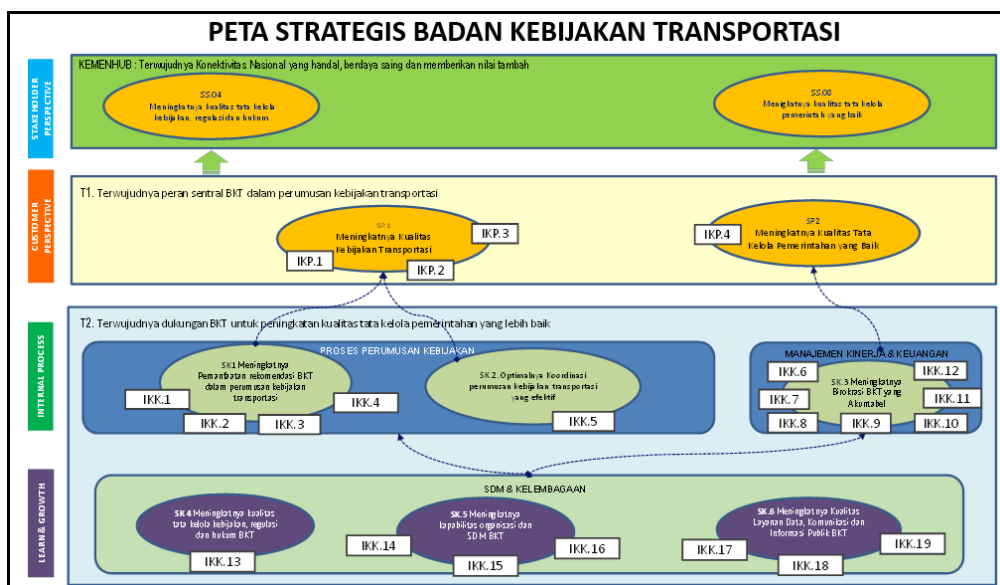
Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek Integrasi Perencanaan. Berikut tabel hasil perhitungan Indeks Perencanaan Tahun 2023:

Tabel 3. 13 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan

NO	ASPEK	Bobot	Nilai
A	Integrasi Perencanaan		
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra dengan sasaran Kementerian Perhubungan *)	20%	20%
2	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja dengan sasaran PN, dalam RKP	40%	40%
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja dengan sasaran Renstra **)	40%	40%
Total Integrasi Perencanaan			100%
<i>Keterangan:</i> *) diukur 1 kali dalam 5 tahun **) untuk mengukur Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi			

Berdasarkan tabel hasil perhitungan indeks perencanaan Badan Kebijakan Transportasi di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian IKK 7 ini adalah sebagai berikut:

- Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi telah selaras dengan Sasaran Kementerian Perhubungan, hal ini dikarenakan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan Sasaran Program Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan juga Sasaran Prioritas Nasional dalam dokumen RKP. Kesesuaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi dengan Sasaran Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 3. 2 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi

- b. Dokumen penganggaran Badan Kebijakan Transportasi telah disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan pemrograman Badan Kebijakan Transportasi, sehingga sasaran program Badan Kebijakan Transportasi dalam dokumen Renja Badan Kebijakan Transportasi telah sesuai dengan sasaran yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan, pemrograman, dan penganggaran Badan Kebijakan Transportasi selalu memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta Badan Kebijakan Transportasi selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut sehingga dokumen perencanaan terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- d. Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan penyesuaian Sasaran Progran dan Indikator Kinerja Program pada aplikasi KRISNA RENJA sehingga indikator pada aplikasi tersebut telah sesuai dengan Sasaran Progran dan Indikator Kinerja Program yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi tahun 2022, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84	100	100	100	85

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 7 pada tahun 2023 yaitu sebesar 100 telah melampaui target sebesar 84 sehingga capaian kinerjanya sebesar **119,05%**. Realisasi sampai dengan tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Dalam rangka menjaga konsistensi keselarasan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi maka perlu dilakukan updating dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Renja) jika terjadi perubahan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 7 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.624.928.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp1.624.918.428,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp9.572,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 15 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi		1.624.928.000	1.624.918.428	9.572	99,9994%
	Program Infrastruktur Konektivitas		873.970.000	873.963.924	6.076	99,9993%
	a. Koordinasi Perencanaan Sistem Transportasi Wilayah Ibu Kota Negara Baru	1 Laporan	111.141.000	111.140.960	40	100,0000%
	b. Harmonisasi Rencana Strategis Kebijakan Transportasi	1 Laporan	379.975.000	379.972.525	2.475	99,9993%
	c. Konsolidasi Penyiapan Bahan dan Materi Pimpinan	1 Laporan	125.092.000	125.090.707	1.293	99,9990%
	d. Evaluasi Kemanfaatan Sektor Transportasi	1 Laporan	58.591.000	58.590.106	894	99,9985%
	e. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Manfaat Kebijakan Transportasi	1 Laporan	199.171.000	199.169.626	1.374	99,9993%
	Program Dukungan Manajemen		750.958.000	750.954.504	3.496	99,9995%
	a. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	4 Dokumen	567.718.000	567.716.321	1.679	99,9997%
	b. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH)	2 Laporan	183.240.000	183.238.183	1.817	99,9990%

IKK 8: Indeks Pengelolaan Keuangan BKT

Mengadopsi dari Permendagri No.19 Tahun 2020, Pasal 1, Indeks Pengelolaan Keuangan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, antara lain sebagai berikut:

a. Kinerja anggaran dengan bobot 60%;

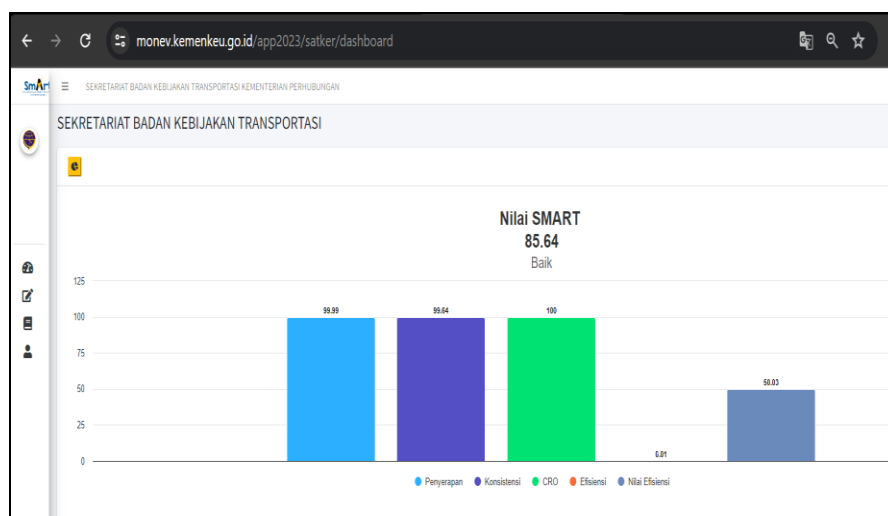
Evaluasi kinerja anggaran merupakan suatu proses untuk melakukan, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga evaluasi kinerja anggaran dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh nilai kinerja anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%;

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil pengukuran nilai kinerja anggaran dan IKPA Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan:

a. Pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar 85,64 jika dikalikan dengan bobot 60% maka diperoleh skor untuk nilai kinerja anggaran sebesar 51,384



Sumber : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Gambar 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

- b. Nilai IKPA Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 97,79 jika dikalikan dengan bobot 40% diperoleh hasil akhir skor untuk nilai IKPA sebesar 39,116.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI												
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN												
Sampai Dengan : DESEMBER												
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satter	Uraian Satter	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
						Revisi DIPA	Deviasi Rata-rata DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispersi SPM
1	133	022	288752	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Nilai	100,00	81,66	99,64	97,00	100,00	100,00	100,00
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10,00	8,17	19,93	9,70	10,00	10,00	25,00
					Nilai Aspek	90,83			99,33			100,00
2	133	022	288944	PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	Nilai	100,00	72,18	95,71	100,00	100,00	80,99	100,00
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10,00	7,22	19,14	10,00	10,00	8,10	25,00
					Nilai Aspek	86,09			95,34			100,00
3	133	022	634171	PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Nilai	100,00	45,22	76,44	100,00	100,00	93,26	100,00
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10,00	4,52	15,29	10,00	10,00	9,33	25,00
					Nilai Aspek	72,61			93,94			100,00
4	133	022	414267	PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	Nilai	100,00	25,38	79,56	100,00	100,00	95,49	100,00
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10,00	2,54	15,91	10,00	10,00	9,55	25,00
					Nilai Aspek	62,69			95,01			100,00
5	133	022	288951	PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	Nilai	100,00	81,02	95,81	100,00	100,00	100,00	0,00
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10,00	8,10	19,16	10,00	10,00	5,00	0,00
					Nilai Aspek	90,51			99,16			0,00

Gambar 3. 4 Nilai IKPA Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran skor dari tiap indikator untuk menilai Indeks Pengelolaan Keuangan BKT diperoleh hasil realisasi tahun 2023 adalah sebesar 90,50 telah melampaui target pada tahun 2023 yaitu sebesar 88,20. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 8, antara lain:

- Pada tahun 2023 Badan Kebijakan Transportasi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan, sehingga setiap bulan dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran serta dapat segera diberikan solusi penyelesaian kendala dan permasalahan tersebut;
- Partisipasi aktif pimpinan Badan Kebijakan Transportasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan;
- Pada masa pandemi di tahun 2023 Badan Kebijakan Transportasi mampu secara cepat beradaptasi dengan adanya transformasi kelembagaan.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan target 2023, dan realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2	90,50	92,28	87,85	90,20

Dapat dilihat pada tabel 3.12 bahwa angka realisasi untuk IKK 8 pada tahun 2023 yaitu sebesar 90,50 telah melampaui target sebesar 88,2 sehingga capaian kinerjanya sebesar **102,61%**.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 8 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp38.547.582.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp38.541.180.498,- (99,98%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 6.401.502,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 17 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		38.547.582.000	38.541.180.498	6.401.502	99,9834%
	Program Infrastruktur Konektivitas		2.918.041.000	2.918.039.040	1.960	99,9999%
	a. Konsolidasi dan Koordinasi Badan Kebijakan Transportasi	1 Dokumen	2.918.041.000	2.918.039.040	1.960	99,9999%
	Program Dukungan Manajemen		35.629.541.000	35.623.141.458	6.399.542	99,9820%
	a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen	34.805.083.000	34.798.705.146	6.377.854	99,9817%
	b. Penyusunan Laporan Triwulanan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi	1 Dokumen	132.780.000	132.779.450	550	99,9996%
	c. Penyusunan Laporan Keuangan	8 Laporan	428.006.000	427.987.863	18.137	99,9958%
	d. Pelaksanaan dan Pelaporan PIPK Badan Kebijakan Transportasi	1 Dokumen	10.857.000	10.856.500	500	99,9954%
	e. Pelaksanaan dan Pelaporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan	1 Dokumen	8.184.000	8.184.000	-	100,0000%
	f. Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	244.631.000	244.628.499	2.501	99,9990%

IKK 9: Nilai SAKIP BKT

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*).

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%;
3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%.

Tabel 3. 18 Interpretasi Penilaian Hasil Evaluasi SPIP

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan; telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>).
2	A	>80 – 90	Memuaskan; terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik; akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
4	B	>60 – 70	Baik; terlihat masih perlu adanya sedikit pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai); masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
6	C	>30 – 50	Kurang; sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang; sistem dan tatanan sama sekali tidak dapat diandalkan, sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar.

Nilai realisasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal pada bulan Juni s.d Juli 2023. Nilai realisasi sesuai Surat Itjen Nomor PS.307/1/1/ITJEN/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kebijakan Transportasi.

Perbandingan realisasi indikator Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	80,8	-	-	82

Nilai SAKIP BKT merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga belum ada realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi untuk IKK 9 pada tahun 2023 yaitu sebesar 80,8 belum mencapai target sebesar 81 sehingga capaian kinerjanya sebesar **99,75%**. Realisasi sampai dengan tahun 2023 belum mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Faktor penyebab Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi tidak memenuhi target tahun 2023 karena adanya transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sehingga masih terdapat beberapa dokumen yang menggunakan redaksi Badan Litbang Perhubungan dan mempengaruhi beberapa aspek penilaian. Menindaklanjuti hal tersebut, di tahun 2024 dimana tahun akhir periode Renstra target pada Perjanjian Kinerja untuk IKK 9 Nilai SAKIP BKT disesuaikan menjadi 81.

Untuk meningkatkan Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi, maka hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian dokumen sesuai redaksi Badan Kebijakan Transportasi, meningkatkan upaya lebih baik lagi dalam pemenuhan data dukung penilaian SAKIP, dan pelaksanaan pemantauan capaian kinerja secara berkala agar sesuai target yang telah ditetapkan.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 9 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 677.264.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 677.261.320,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.680,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Nilai SAKIP BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi		677.264.000	677.261.320	2.680	99,9996%
	Program Dukungan Manajemen		677.264.000	677.261.320	2.680	99,9996%
	Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP	12 Dokumen	677.264.000	677.261.320	2.680	99,9996%

IKK 10: Indeks Pengelolaan BMN BKT

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai entitas pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, maka semua BMN dicatat dengan baik, semua aktivitas dalam pengelolaan BMN dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Indeks pengelolaan BMN BKT merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian Indeks Pengelolaan BMN BKT terdiri dari 2 indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%), berikut merupakan rincian perhitungan berdasarkan indikator.

Tabel 3. 21 Rincian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2023

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT	Nilai BKT	
1	Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya				
a	Lebih dari sama dengan 80%	1	50%	93,36	1
b	60% s.d. kurang dari 80%	0,80			
c	40% s.d. kurang dari 60%	0,60			
d	20% s.d. kurang dari 40%	0,40			
e	1% s.d. kurang dari 20%	0,20			

f	0% s.d. kurang dari 1%	0			
Total Tingkat Pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya = nilai (1) x bobot			50		50
2	Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN				
a	Laporan BMN Semester 1	1	50%	1	33,33
b	Laporan BMN Semester 2/Tahunan	1		1	33,33
c	Laporan Wasdal BMN (Semesteran/Tahunan)	2		2	33,33
Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = nilai (2) rata-rata x bobot			50		50,00
Indeks Pengelolaan BMN BKT = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan			Maksimal nilai = 100		100,00

Berdasarkan hasil penilaian sesuai indikator diatas, Badan Kebijakan transportasi telah melakukan penetapan status penggunaan BMN sebesar 96,36%, selain itu telah disusun Laporan BMN Semester II T.A. 2022, Laporan BMN Semester I T.A. 2023, Laporan Wasdal BMN Semester II T.A. 2022, dan Laporan Wasdal BMN Semester I T.A. 2023.

Perbandingan realisasi indikator Indeks pengelolaan BMN BKT Tahun 2023 dengan target 2022, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	76	100	76,8	76,25	77

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 10 pada tahun 2023 yaitu sebesar 100 telah melampaui target tahun 2023 sebesar 76 sehingga capaian kinerjanya sebesar **131,58%**. Realisasi sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 10, antara lain:

- Badan Kebijakan Transportasi telah mengelola, menatausahakan dan melakukan pencatatan BMN dengan baik dituangkan dalam Catatan atas Laporan BMN yang disusun setiap semester dan tahunan;
- Melakukan rekonsiliasi berkala dengan seluruh satuan kerja dalam hal penggabungan data BMN dalam rangka tertib administrasi.

Langkah strategis yang akan dilakukan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN yang baik yaitu:

- Menindaklanjuti penatausahaan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN untuk aset yang belum dilakukan penetapan status penggunaannya kepada KPKNL Jakarta I atau Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai batas kewenangan yang berlaku.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 10 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.324.964.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 4.324.960.941,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.059,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 23 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi		4.324.964.000	4.324.960.941	3.059	99,9999%
	Program Dukungan Manajemen		4.324.964.000	4.324.960.941	3.059	99,9999%
	a. Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Kebijakan Transportasi	6 Laporan	450.247.000	450.244.838	2.162	99,9995%
	b. Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Kebijakan Transportasi	6 Laporan	102.291.000	102.290.993	7	100,0000%
	c. Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Layanan	691.200.000	691.200.000	-	100,0000%
	d. Pengadaan Furniture Custom	1 Layanan	283.827.000	283.827.000	-	100,0000%
	e. Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Layanan	1.156.199.000	1.156.198.110	890	99,9999%
	f. Pengadaan Alat Pemroses Data	1 Layanan	1.641.200.000	1.641.200.000	-	100,0000%

IKK 11: Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT

Perkembangan tantangan dan kendala yang dihadapi sektor transportasi akhir-akhir ini semakin besar ditambah dengan adanya tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, Badan Kebijakan Transportasi sebagai institusi yang membidangi analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dituntut mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mudah diaplikasikan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan pihak lain ditunjang dengan sumber daya yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Peran jejaring kerjasama dengan semua pihak yang terlibat sangat penting dalam proses perumusan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan implementatif dan mengusung nilai keadilan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa usulan rekomendasi kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan lebih lanjut.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam hal ini selaku koordinator kegiatan pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang perumusan rekomendasi kebijakan transportasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Kerjasama dan kemitraan yang telah dihasilkan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 antara lain:

1. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Institut Teknologi Bandung melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor HK.201/01/08/BKT/2023,017/IT1.B07/KS.00/2023 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi antara BKT dengan Institut Teknologi Bandung.

Tindak lanjut dari pendatanganan nota kesepahaman ini yaitu

- a) Kesepakatan Kerja Sama antara Pusat Kebijakan Prasaranan Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan dirgantara ITB pada tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor HK.201/1/3/PKPTIM/2023, 452/IT1.C04/KS/2023 tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penentuan Kriteria Bandar Udara Pengumpul dan Pengumpan untuk Optimalisasi dan Penguatan Jaringan Transportasi Udara.
 - b) Kesepakatan Kerja Sama antara Pusat Kebijakan Prasaranan Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi dengan Fakultas Teknologi Industri ITB pada tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor HK.201/1/4/PKPTIM/2023, 2406/IT1.C07/KS/2023 tentang Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara.
2. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Universitas Hasanuddin melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 20 Maret 2023 dengan nomor HK.201/01/09/BKT/2023, 6603/UN4.1/HK.07/2023 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi antara BKT dengan Universitas Hasanuddin.

Tindak lanjut dari pendatanganan nota kesepahaman ini yaitu pelaksanaan kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan yang berjudul “Perumusan Kebijakan terkait Angkutan Massal pada Kawasan Aglomerasi di Indonesia”.

3. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Angkasa Pura II pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan nomor HK.201/01/12/BKT/2023, PJJ.02.06/00/08/2023/0227 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi Udara.

Tindak lanjut dari pendatanganan nota kesepahaman ini dengan PT. Angkasa Pura II dan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Badan Kebijakan Transportasi terkait bidang transportasi udara sesuai Nota Dinas Nomor 497/12/09/SBKT/2023;

4. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Kompas Media Nusantara pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan nomor SOP-Setban 2 Tahun 2023, 202/AE-IKL/KP/X/2023 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Kebijakan Bidang Transportasi antara Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub dengan Kompas Media Nusantara.

Tindak lanjut dari pendatanganan nota kesepahaman ini yaitu Perjanjian Kerja Sama Nomor 201/AE-IKL/KP/X/2023 antara Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan

Transportasi Perkotaan dengan PT Kompas Media Nusantara tentang Penyelenggaraan Analisis, Evaluasi Kebijakan, dan Publikasi Potensi Pergerakan Selama Masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah Total Kerja Sama}} \times 100\%$$

Perbandingan realisasi indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86	100	100	100	87

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 11 pada tahun 2023 yaitu sebesar 100 telah melampaui target sebesar 86 sehingga capaian kinerjanya sebesar **116,28%**. Realisasi tahun 2023 telah melampaui di tahun 2023 maupun target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Faktor keberhasilan pencapaian pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT dengan melakukan komunikasi proaktif dan melaksanakan kunjungan langsung ke beberapa universitas di Indonesia untuk melakukan peninjauan potensi kajian yang bisa dikerjasamakan. Dalam pencapaian target indikator ini kedepannya perlu konsistensi dalam komunikasi dengan universitas dan instansi lain untuk menjaring rencana kerja sama lainnya.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 11 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp704.781.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp704.779.315,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.685,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi		704.781.000	704.779.315	1.685	99,9998%
	Program Infrastruktur Konektivitas		403.077.000	403.076.726	274	99,9999%
	Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama Perumusan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	403.077.000	403.076.726	274	99,9999%
	Program Dukungan Manajemen		301.704.000	301.702.589	1.411	99,9995%
	Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	301.704.000	301.702.589	1.411	99,9995%

IKK 12: Indeks Penyelenggaraan Perkantoran

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Badan Kebijakan Transportasi. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan pengguna sarana dan prasarana perkantoran di gedung Kantor Badan Kebijakan Transportasi yang meliputi aspek sarana, prasarana, SDM, keselamatan dan keamanan gedung serta fasilitas lainnya yang tersedia di lingkungan kantor Badan Kebijakan Transportasi. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Kualitas pelayanan dinilai dari tingkat kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterjangkauan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Pengukuran indeks penyelenggaraan perkantoran dihitung dengan melalui survei yang dilakukan dengan pengisian kuesioner yang nantinya nilai kuesioner akan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%). Kuesioner yang digunakan untuk penilaian IKK 12 terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung dengan jumlah total pertanyaan sebanyak 88 pertanyaan.

Teknik pengambilan sampel responden menggunakan Rumus Slovin dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n = Sampel, N = Populasi, d = nilai presisi 90% atau sig.0,10

Responden dalam pengisian kuesioner ini terdiri dari dua kategori yaitu kategori internal yang merupakan pegawai Kementerian Perhubungan (termasuk pegawai Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan pengunjung lainnya) dan kategori eksternal yang pengunjung lainnya yang berkunjung ke kantor Badan Kebijakan Transportasi. Berikut tabel perhitungan pengambilan sampel responden:

Tabel 3. 26 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus *Slovin* dan Realisasi Responden

NO.	RESPONDEN	Badan Kebijakan Transportasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Unit Kerja Eselon 1 Lainnya	TOTAL RESPONDEN
1.	Pegawai Kementerian Perhubungan (ASN, PPNP, PPPK)	26	17	61	104
2.	Non Pegawai Kementerian Perhubungan				2094
TOTAL		26	17	61	2198

Analisis hasil survei dilakukan dengan menggunakan analisis Skala Likert yang merupakan salah satu bentuk skala yang digunakan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Skor Skala Likert dalam pengukuran IKK 12 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Skor Skala *Likert*

SKOR	JAWABAN
1	Tidak Baik
2	Kurang Baik
3	Cukup Baik
4	Baik
5	Sangat Baik

Dari seluruh data yang terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan jenis jawaban yang diperoleh setelah itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

T = Total jumlah responden yang memilih, P_n = Pilihan angka skor Likert

Setelah itu dilakukan pengukuran Skor Interpretasi yang harus terlebih dahulu diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden} \quad X = \text{Skor Terendah} \times \text{Jumlah Responden}$$

Langkah terakhir, untuk mengetahui kesimpulan dari hasil survei adalah dengan menghitung Skor Interpretasi responden yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Tabel 3. 28 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala Likert

SKOR	JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	SKOR TERENDAH (X)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) x (3)	(5)	(6)
1	Tidak Baik	4446	4446	Y = 5 x 151883	X = JUMLAH SKOR LIKERT x Y
2	Kurang Baik	7401	14802		
3	Cukup Baik	30902	92706		
4	Baik	58155	232620		
5	Sangat Baik	50979	254895		
TOTAL SKOR			599469	759415	78,94%

Setelah dilakukan perhitungan indeks, perlu dilakukan pengukuran interval (rentang jarak) dan interpretasi persentase dengan metode mencari Interval Skor Persen (I) dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh hasil Interval Skor Persen yaitu sebesar 20 yang interval jaraknya dari terendah sebesar 0% hingga tertinggi sebesar 100%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$I = \frac{100}{5} = 20$$

Dari pengukuran interpretasi skor di atas, diperoleh hasil berdasarkan interval adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Interval Interpretasi Skor

SKOR	JAWABAN
0% - 19,99%	Tidak Baik
20% - 39,99%	Kurang Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
60% - 79,99%	Baik
80% - 100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel perhitungan di atas diperoleh realisasi untuk IKK 12 sebesar 78,94 dengan interpretasi skor **“Baik”**, telah melampaui target tahun 2023 sebesar 73 sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator indeks penyelenggaraan perkantoran sebesar 108,14%.

Secara rinci penilaian indeks penyelenggaraan perkantoran dari tiap aspek penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 30 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian

NO.	ASPEK	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	INDEKS (%)	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)
1	Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran	374142	473865	78,9554%	Baik
2	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	173474	219610	78,9918%	Baik
3	Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung	51853	65940	78,6366%	Baik
TOTAL SKOR		1415096	599469	759415	78,94%

Perbandingan realisasi indikator Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	78,94	76,44	78,92	74

Dapat dilihat pada tabel 3.31 bahwa angka realisasi untuk IKK 12 pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,94 telah melampaui target sebesar 73 sehingga capaian kinerjanya sebesar **123,09%**. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Komitmen tinggi Badan Kebijakan Transportasi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkantoran dengan tersedianya sarana dan prasarana di kantor Badan Kebijakan Transportasi yang memadai dan secara berkala rutin dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya, sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan dengan semestinya. Selain itu Badan Kebijakan Transportasi selalu melakukan *update* sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan perubahan teknologi;
- Badan Kebijakan Transportasi secara rutin setiap harinya melakukan pengarahan dan evaluasi kinerja kepada SDM pelaksana penyelenggaraan perkantoran, sehingga SDM tersebut dapat memberikan pelayanan yang prima;
- Tersedianya sarana dan prasarana Badan Kebijakan Transportasi yang mendukung keselamatan dan keamanan para pengguna.

Badan Kebijakan Transportasi akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan oleh para responden dalam pengisian kuesioner survei indeks penyelenggaraan perkantoran.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 13 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp599.330.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 599.328.039,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.961,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 32 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran		19.151.599.000	19.151.540.493	58.507	99,9997%
	Program Dukungan Manajemen		19.151.599.000	19.151.540.493	58.507	99,9997%
	a. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Petugas Keamanan, Kebersihan, Pengemudi dan Teknisi di Gedung Merdeka Timur	1 Layanan	736.306.645	736.306.645	-	100,0000%
	b. Pelaksanaan Satuan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban Gedung (PKG)	1 Layanan	601.279.850	601.279.850	-	100,0000%
	c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	17.814.010.000	17.813.953.998	56.002	99,9997%

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT

Pencapaian sasaran kegiatan empat diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 33 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2023	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	95	125,00	131,58%

IKK 13: Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan tata kelola kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam hal ini selaku penyiap bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan berkewajiban membuat NSPK untuk dijadikan pedoman agar tercipta sinergi antara unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Pengukuran persentase usulan pembentukan terhadap NSPK (tata kelola kebijakan internal BKT) dihitung dengan membagi jumlah realisasi NSPK yang dihasilkan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total keseluruhan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Transportasi menargetkan penyusunan 4 (empat) NSPK. Sampai dengan akhir tahun 2023 telah tersusun sebanyak lima peraturan. Adapun rancangan peraturan yang telah menjadi peraturan antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala BKT Nomor KP-BKT 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Proses Bisnis Aplikasi E-Survey di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi disahkan pada tanggal 10 April 2023;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan disahkan pada tanggal 28 April 2023;
3. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BKT 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023-2024 disahkan pada tanggal 26 Juni 2023;
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 23 Tahun 2023 tentang Keselamatan Kerja Elevator dan Eskalator pada Prasarana Transportasi dan Gedung Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2023;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2023 Tentang Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan disahkan pada tanggal 27 November 2023.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pemenuhan NSPK Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	95	125	-	-	100

Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga belum ada realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 13 pada tahun 2023 yaitu sebesar 125 telah melampaui target sebesar 95 sehingga capaian kinerjanya sebesar **131,58%**. Realisasi tahun 2023 telah melampaui di tahun 2023 maupun target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Faktor keberhasilan pencapaian pelaksanaan Tingkat Pemenuhan NSPK di Badan Kebijakan Transportasi karena *output* rekomendasi kebijakan yang mengarah ke NSPK ada lebih dari yang ditentukan dengan minimal terdapat naskah akademik atau naskah urgensi sehingga biaya yang dibutuhkan juga masih dapat diakomodir dengan anggaran yang tersedia. Dalam pencapaian target indikator ini kedepannya perlu konsistensi Analisis Kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan terkait regulasi.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 13 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 599.330.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 599.328.039,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.961,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 35 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi		599.330.000	599.328.039	1.961	99,9997%
	Program Infrastruktur Konektivitas		599.330.000	599.328.039	1.961	99,9997%
	a. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pusat Kebijakan Transportasi	1 Laporan	487.807.000	487.805.249	1.751	99,9996%
	b. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rancangan Perumusan Kebijakan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	111.523.000	111.522.790	210	99,9998%

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT

Pencapaian sasaran kegiatan lima diwujudkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 36 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2023	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5	75,59	95,08%
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74	75,04	101,40%
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,96	100,00%

IKK 14: Indeks Kelembagaan BKT

Perhitungan indikator kinerja indeks kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Indeks dihitung berdasarkan hasil rata-rata survei pada instansi pemerintah dengan sampel dua tingkatan organisasi yakni tingkatan tertinggi dan tingkatan di bawah tingkatan tertinggi.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi kelembagaan, yaitu:

- Tersedianya rekomendasi untuk melaksanakan penataan organisasi;
- Salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Badan Kebijakan Transportasi.

Mengacu pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi kelembagaan dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap unit kerja Eselon II. Kuesioner yang disampaikan merupakan alat ukur yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan terkait evaluasi kelembagaan. Metode tahapan evaluasi kelembagaan meliputi:

a. Persiapan

Pada tahapan ini adalah dilakukan penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan.

b. Pengumpulan Data Responden

Responden yang melaksanakan pengisian kuisisioner evaluasi kelembagaan merupakan perwakilan dari setiap unit kerja Eselon II.

c. Pelaksanaan Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan oleh setiap responden berdasarkan kondisi lingkungan organisasi masing-masing. Mekanisme pelaksanaan dapat menggunakan dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* melalui fasilitasi pengisian kuisisioner secara *online*.

d. Pengolahan Data: Penghitungan Nilai, Bobot dan Konversinya

Analisis pengolahan data dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai, bobot dan konversinya berdasarkan Pedoman Evaluasi Kelembagaan yang telah ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat sebanyak 66 (enam puluh enam) pertanyaan instrumen yang dikelompokkan dalam dua dimensi dan delapan sub dimensi. Adapun setiap pertanyaan memiliki nilai jawaban yang menggunakan pendekatan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Untuk perhitungan nilai dari jawaban yang dipilih telah ditetapkan bobot untuk masing-masing dimensi sesuai PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai konversinya.

e. Pengkategorian Hasil Perhitungan

Pengkategorian hasil perhitungan evaluasi dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot dan konversinya. Selanjutnya hasil perhitungan akhir disajikan menyeluruh dalam bentuk peringkat komposit (P). Peringkat komposit menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima) kategori sebagaimana ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Rentang nilai peringkat komposit berikut interpretasi dari setiap peringkat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 37 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81 – 100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61 – 80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41 – 60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21 – 40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0 – 20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

Berdasarkan hasil pengisian kuisioner A2, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memperoleh total nilai sebesar 75,59 yang diperoleh dari total nilai Dimensi Struktur dan Dimensi Proses Organisasi. Perolehan total skor nilai 75,59 mendudukan BKT berada pada peringkat komposit P-4 yang mengindikasikan bahwa organisasi BKT dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif, memiliki kemampuan mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan

mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun tercatat masih terdapat beberapa kelemahan minor yang perlu segera diatasi melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Kelembagaan Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi Tahun 2020, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5	75,59	-	-	80

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 14 pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,59 belum mencapai target sebesar 79,5 sehingga capaian kinerjanya sebesar **95,08%**. Berdasarkan Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat **3 (tiga) tahun sekali**. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan perubahan susunan organisasi Kemenhub yang awalnya terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan saat ini menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Dengan adanya transformasi unit kerja ini, artinya organisasi Badan Kebijakan Transportasi **baru berdiri selama satu tahun** dan belum dapat dilaksanakan Evaluasi Kelembagaan.

Tetapi pada tahun 2023 Kementerian Perhubungan perlu melaksanakan evaluasi kelembagaan sehingga organisasi dibawahnya juga diarahkan untuk melaksanakan Evaluasi Kelembagaan. Oleh karena itu, di tahun 2023 sesuai arahan tersebut BKT ikut melaksanakan Evaluasi Kelembagaan walaupun baru berdiri selama satu tahun. Menindaklanjuti hal tersebut, Evaluasi Kelembagaan berikutnya akan dilaksanakan kembali dengan periode 3 tahun mendatang yaitu pada tahun 2026. Hal ini menyebabkan realisasi Indeks Kelembagaan BKT tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk perbaikan dalam penilaian Indeks Kelembagaan antara lain:

- Menyusun ulang seluruh proses bisnis dalam bentuk SOP meliputi kegiatan kebijakan dan kegiatan dukungan manajemen;
- Menyusun sistem kerja baru sesuai Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 sehingga memberikan kejelasan kewenangan dari setiap jabatan serta lingkup tanggung jawabnya masing-masing melalui pelaksanaan pekerjaan oleh kelompok kerja.

Menindaklanjuti peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali, maka nilai kelembagaan yang diperoleh saat ini akan digunakan selama 3 tahun sehingga untuk mengakomodir permasalahan ini di tahun 2024 dimana tahun akhir periode Renstra target pada Perjanjian Kinerja untuk IKK 14 Indeks Kelembagaan BKT disesuaikan menjadi 75.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 14 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp646.008.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 646.002.583,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp5.417,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 39 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 14	Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi		646.008.000	646.002.583	5.417	99,9992%
	Program Dukungan Manajemen		646.008.000	646.002.583	5.417	99,9992%
	a. Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Bidang SDM dan Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	229.448.000	229.445.662	2.338	99,9990%
	b. Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	178.937.826	178.937.826	-	100,0000%
	c. Penataan Organisasi	1 Laporan	237.619.095	237.619.095	-	100,0000%

IKK 15: Indeks Profesionalisme ASN BKT

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN telah diatur dalam peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh ASN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2023. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

- Pegawai ASN, dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
- Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; dan
- Masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN ini berdasarkan 4 (empat) dimensi, yang disetiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN, yaitu antara lain:

- Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Indikator yang digunakan adalah jenjang Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata Tiga), S-2 (Strata

Dua), S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat), D-III (Diploma Tiga), D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat, di bawah SLTA.

- b. Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.
- c. Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- d. Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, dan Hukuman disiplin berat.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

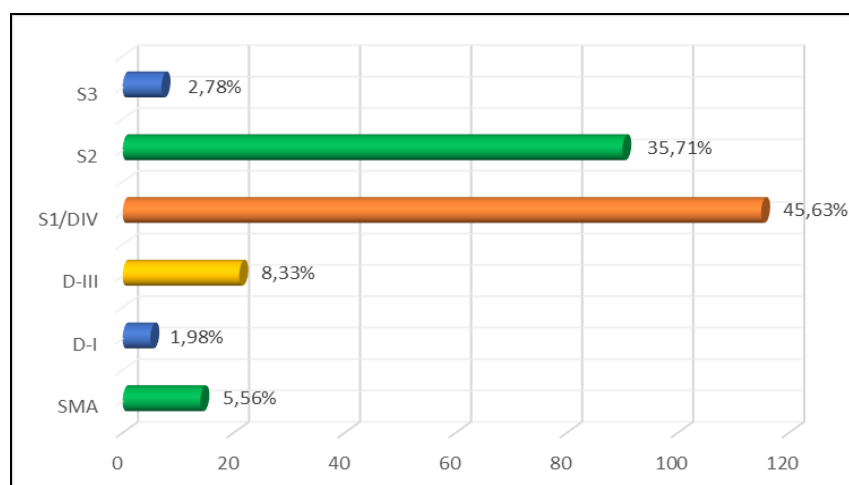
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui [link https://ip-jasn.bkn.go.id/](https://ip-jasn.bkn.go.id/) dengan target triwulan sebesar 74. Pengukuran Indeks ini dilakukan **setahun sekali yaitu pada akhir tahun berjalan**. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi dalam hal mendukung ketercapaian indikator ini adalah dengan melakukan updating data kepegawaian pada aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN perihal data:

- a. Pendidikan Terakhir Pegawai;
- b. Kompetensi Pegawai;
- c. Kinerja Pegawai; dan
- d. Disiplin Pegawai.

Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan penilaian mandiri untuk Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai Badan Kebijakan Transportasi. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Indeks Profesionalitas ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 adalah sebesar 75,04. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN didapatkan dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator ini, antara lain:

- a. Tingkat Pendidikan pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang sebagian besar telah berada pada jenjang Pendidikan S-2 (Strata Dua) dan S-1 (Strata Satu), yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Gambar 3. 5 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi

- b. Pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang setiap tahunnya selalu berpartisipasi aktif atau ikut serta dalam pengembangan kompetensi baik dalam bentuk Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya. Selain itu Badan Kebijakan Transportasi juga secara rutin setiap tahun menyelenggarakan berbagai Pendidikan dan Pelatihan untuk diikuti oleh pegawai Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat;
- c. Kinerja pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang berdasarkan pada penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) rata-rata berada pada kriteria Sangat Baik dan Baik.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74	75,04*	81,76*	82,60*	75

Keterangan*: Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 15 pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,04 telah melampaui target sebesar 74 sehingga capaian kinerjanya sebesar **101,40%**. Realisasi tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan sebagian besar pegawai yang menduduki jabatan fungsional belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki karena pada tahun 2023 baru terjadi peralihan jabatan fungsional peneliti menjadi fungsional analis kebijakan maupun perencana sehubungan dengan transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu juga karena jumlah pegawai yang diakui kompetensinya tidak sebanyak tahun lalu karena beberapa instansi pembina masih mensyaratkan diklat fungsional dasar untuk diakui.

Dalam upaya peningkatan indeks profesionalisme ASN, pada tahun 2023 Badan Kebijakan Transportasi telah mengajukan pelaksanaan diklat fungsional, diklat teknis, maupun program pelatihan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas SDM.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 15 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.112.760.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 2.112.754.538,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp5.462,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 41 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi		2.112.760.000	2.112.754.538	5.462	99,9997%
	Program Infrastruktur Konektivitas		1.119.812.000	1.119.809.650	2.350	99,9998%
	a. Pengembangan Kompetensi Pegawai	1 Laporan	848.797.000	848.795.354	1.646	99,9998%
	b. Penyelenggaraan Kegiatan Temu Karya Analis Kebijakan	1 Laporan	271.015.000	271.014.296	704	99,9997%
	Program Dukungan Manajemen		992.948.000	992.944.888	3.112	99,9997%
	a. Pengembangan Motivasi Pegawai	1 Laporan	649.286.000	649.284.393	1.607	99,9998%
	b. Pembinaan Karir dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	6 Dokumen	149.021.000	149.020.774	226	99,9998%
	c. Pengelolaan Kegiatan Konseling Pegawai	1 Laporan	194.641.000	194.639.721	1.279	99,9993%

IKK 16: Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi. Penilaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit.

Skor sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan, antara lain:

- Kurang dengan skor 1, jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan;
- Cukup dengan skor 2, jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- Baik dengan skor 3, jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.

Berikut ini tabel hasil perhitungan mandiri Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi:

Tabel 3. 42 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi

NO.	ASPEK	TOTAL BOBOT	BOBOT BKT
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai	40	40
2	Pengadaan Pegawai	40	40
3	Pengembangan Karir Pegawai	130	117,5
4	Promosi dan Mutasi Pegawai	40	40
5	Manajemen Kinerja Pegawai	80	77,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Pegawai	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan Pegawai	16	16
8	Sistem Informasi Pegawai	24	22
JUMLAH		410	393
INDEKS TATA KELOLA MANAJEMEN ASN: Jumlah Bobot / Jumlah Total Bobot			0,96

Perbandingan realisasi indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,96	0,93	0,93	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target 2023 yaitu sebesar 0,96 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%. Keberhasilan capaian pada indikator ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Badan Kebijakan Transportasi secara rutin selalu melakukan pembaharuan data pegawai yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi selain itu Badan Kebijakan Transportasi setiap tahun telah melakukan analisis beban kerja sehingga telah tersedia peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai Badan Kebijakan Transportasi untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi No. 99 Tahun 2023 tentang kebutuhan PNS di Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024;
- b. Setiap tahun Badan Kebijakan Transportasi melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat diselenggarakan diklat sesuai kebutuhan pegawai dan dapat mengatasi kesenjangan kompetensi serta kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- c. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan dan pengusulan *assessment* untuk jabatan struktural, sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kebijakan jabatan struktural secara terbuka dan kompetitif;
- d. Telah tersosialisasinya kebijakan internal tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta telah terlaksananya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai Badan Kebijakan Transportasi dalam bentuk dokumen Laporan Unit Kepatuhan Internal yang disusun tiap triwulan.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 16 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.252.056.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 2.252.049.688,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp6.312,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 44 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi		2.252.056.000	2.252.049.688	6.312	99,9997%
	Program Infrastruktur Konektivitas		1.495.260.000	1.495.257.745	2.255	99,9998%
	Penyelenggaraan Koordinasi, Sosialisasi dan Bimtek Jabatan Fungsional	1 Laporan	1.495.260.000	1.495.257.745	2.255	99,9998%
	Program Dukungan Manajemen		756.796.000	756.791.943	4.057	99,9995%
	a. Penyelenggaraan Fungsi Ketatausahaan, Kearsipan dan Keprotokolan	1 Laporan	111.726.000	111.725.920	80	99,9999%
	b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	564.111.000	564.108.833	2.167	99,9996%
	c. Penyelenggaraan Administrasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional	1 Layanan	80.959.000	80.957.190	1.810	99,9978%

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT

Pencapaian sasaran kegiatan enam diwujudkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2023	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	368,70	491,60%
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	100,00	108,70%
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	92,32	123,09%

IKK 17: Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan

Perpustakaan Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari Badan Kebijakan Transportasi yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyebaran informasi. Berbagai layanan dan fasilitas disediakan oleh perpustakaan dan terus dikembangkan diantaranya Ruang baca yang nyaman, Layanan bimbingan perpustakaan dan layanan lainnya. Seiring perkembangan teknologi saat ini, Perpustakaan Kementerian Perhubungan juga menyediakan layanan online sebagai salah satu sarana untuk memudahkan pemustaka dan peneliti dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Salah satunya adalah OPAC (*Online Public Access Catalogue*). OPAC merupakan katalog *online* yang memberikan informasi tentang koleksi bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik yang ada di perpustakaan. Perpustakaan Kementerian Perhubungan juga telah bersertifikat *ISO 9001:2015 dengan Certificate Registration No. 16 00 1 19145*. Tersedianya layanan dan fasilitas di Perpustakaan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat mendukung kegiatan di bidang transportasi.

Perpustakaan Kementerian Perhubungan menyediakan berbagai koleksi literatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas bertema transportasi dengan berbagai moda. Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan dihitung berdasarkan pengguna layanan Perpustakaan melalui *platform elibrary* Badan Kebijakan Transportasi (elibrary.dephub.go.id).

Indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan pada tahun 2023. Metode perhitungan IKK 17 ini yaitu Jumlah pengguna layanan perpustakaan BKT selama satu tahun dibagi dengan target pengguna layanan. Penentuan bobot target pengguna layanan diusulkan 1.000 pengguna layanan setiap tahun. Rekapitulasi data pemanfaatan *E-library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.45.

Tabel 3. 45 Rekapitulasi Data Pemanfaatan *E-library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan

No	Bulan	Page Views (halaman yang dilihat)	Visitor (pengunjung)	New Visitor (pengunjung baru)
1	Januari	5.778	367	245
2	Februari	2.962	254	156
3	Maret	2.601	340	277
4	April	2.380	218	200
5	Mei	2.832	372	304
6	Juni	2.986	327	271
7	Juli	3.286	415	339
8	Agustus	3.123	425	369
9	September	2.491	390	312
10	Oktober	2.653	359	301
11	November	1.394	166	131
12	Desember	82	52	39
Total		32.568	3.685	2.944

Berdasarkan tabel rekapitulasi data pemanfaatan *E-library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan di atas terdapat 3.687 pengunjung selama periode Januari s.d. Desember 2023. Dibandingkan dengan target pengguna layanan sebanyak 1.000 orang pertahun maka realisasi untuk Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan diperoleh realisasi IKK 17 sebesar 368,7.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2023 dengan target 2022, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	368,7	-	-	75

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 17 pada tahun 2023 yaitu sebesar 368,7 telah melampaui target sebesar 75 sehingga capaian kinerjanya sebesar **491,60%**. Tingkat penggunaan layanan perpustakaan merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga tidak ada capaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga belum ada referensi dalam penentuan target dan menimbulkan anomali gap karena tingginya angka realisasi.

Selain itu, tingginya realisasi juga dikarenakan adanya transformasi digital dalam masyarakat pada masa pandemi sehingga semakin dituntut untuk menggunakan layanan digital dan semakin mudahnya dalam pencarian informasi. Sebagai solusi dan tindak lanjut untuk memperkecil gap antara target dan realisasi, maka direncanakan pada tahun 2024 target Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan pada Perjanjian Kinerja dinaikkan menjadi 100% dengan bobot target pengguna layanan diusulkan 1.500 pengguna layanan dalam satu tahun.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 17 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp432.578.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp432.577.135,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp865,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 47 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan		432.578.000	432.577.135	865	99,9998%
	Program Dukungan Manajemen		432.578.000	432.577.135	865	99,9998%
	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Koordinasi Perpustakaan (Kehumasan)	1 Layanan	432.578.000	432.577.135	865	99,9998%

IKK 18: Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif serta pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan aplikasi dan data sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan terkait analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.

Pada tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melakukan pengembangan dan pembangunan aplikasi yang telah dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal. Selain aplikasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi juga telah menyusun data-data yang juga dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal.

Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data (IKK 18) ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan pengelolaan aplikasi dan data pada tahun 2023. Metode perhitungan IKK 18 ini yaitu Jumlah aplikasi yang digunakan dibagi dengan jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dengan bobot 50% dan Jumlah data yang dimanfaatkan dengan bobot 50%.

Berikut daftar aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada tahun 2023 serta daftar data yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi:

Tabel 3. 48 Daftar Aplikasi dan Data Tahun 2023

NAMA APLIKASI/DATA	URAIAN	KETERANGAN
APLIKASI		
1. <i>Website</i> Balitbanghub	Layanan Publik berbasis website untuk penyebaran media informasi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan seperti informasi kegiatan Berita Badanlitbanghub, Event Forum Group Discussion serta Infografis yang dapat di akses oleh masyarakat.	Digunakan
2. Aplikasi E-Penelitian	Aplikasi E-Penelitian ini merupakan aplikasi khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai usulan penelitian, memonitoring progres penelitian dari awal samapai akhir serta mendokumentasikan hasil-hasil laporan penelitian di Badan Litbang Perhubungan.	Digunakan
3. E-Survey	Aplikasi E-Survei merupakan aplikasi khusus dengan fungsi khusus sebagai dasar data yang dipakai oleh tim peneliti di Badan Litbang Perhubungan untuk merumuskan suatu analisa atau kebijakan strategis seperti Angkutan Lebaran dan Natal dan tahun baru.	Digunakan
4. Aplikasi Cloud Transportasi Antarmoda	Aplikasi Cloud ini merupakan aplikasi khusus dengan fungsi sebagai media penyimpanan, publikasi dan sosialisasi data operasional pegawai, data penelitian dan kegiatan puslitbang transportasi antarmoda.	Digunakan
5. Portal ATTN (Asal Tujuan Transportasi Nasional) Barang	Aplikasi ATTN Barang merupakan aplikasi khusus dengan fungsi sebagai media publikasi dan sosialisasi dari data yang dihasilkan	Digunakan

NAMA APLIKASI/DATA	URAIAN	KETERANGAN
	dari survei ATTN Barang Tahun 2016.	
6. Portal ATTN (Asal Tujuan Transportasi Nasional) Orang/STDN(Sistem Database Transportasi Nasional)	Aplikasi ATTN Orang merupakan aplikasi khusus dengan fungsi sebagai media publikasi dan sosialisasi dari data yang dihasilkan dari survei ATTN Orang Tahun 2018.	Digunakan
7. Aplikasi repository hasil penelitian (Simanis/Sicantik)	Sistem informasi repository data, monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi LSPD.	Digunakan
8. E-Library	Digunakan untuk membantu pengelolaan Perpustakaan.	Digunakan
9. Aplikasi Open Journal System	Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan arsip dokumen dan kegiatan Badan Kebijakan Transportasi.	Digunakan
10. Aplikasi Penyebaran Informasi/Blasting	Mendukung Kegiatan Survei untuk memblasting kuesioner survei.	Digunakan
11. Aplikasi Dashboard Pimpinan	Aplikasi digunakan oleh para pimpinan untuk memonitoring kegiatan.	Digunakan
12. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pelayanan dan Informasi Hasil Penelitian	Digunakan untuk customer badan kebijakan BKT menyampaikan Pengaduan Pelayanan dan Informasi Hasil Penelitian.	Digunakan
13. Aplikasi Cloud Balitbanghub	Tempat Penyimpanan Data Karyawan Badan Kebijakan Transportasi.	Digunakan

NAMA APLIKASI/DATA	URAIAN	KETERANGAN
14. <i>Open Journal System</i> (OJS) Puslitbang Udara	Untuk melakukan publikasi kajian Puslitbang Transportasi Udara.	Digunakan
DATA		
1. Data Statistik Perhubungan	Statistik Perhubungan merupakan terbitan tahunan yang mendokumentasikan kinerja Sektor Perhubungan berdasarkan hasil kompilasi dan pengolahan data operasional secara bulanan, triwulanan, dan semesteran.	Dimanfaatkan oleh Pusdatin, Subsektor, K/L lain
2. Data Produksi Hasil Analis Kebijakan	Data terkait hasil rekomendasi Kebijakan Dalam Bentuk <i>Policy Brief</i> , <i>Policy Paper</i> dan <i>Policy Note</i> .	Dimanfaatkan oleh Subsektor dilingkungan Kemenhub
3. Data Asal - Tujuan ATTN Barang/Orang	Data asal tujuan transportasi barang menggambarkan DEMAND pergerakan barang di masyarakat. Data tersebut digunakan sebagai bahan analisis untuk merumuskan kebijakan-kebijakan transportasi dalam usaha memfasilitasi demand pergerakan barang. Kebijakankebijakan transportasi tadi digunakan untuk memperbaiki perangkat transportasi sebagai bentuk intervensi (perubahan) dari sisi SUPPLY. Data asal tujuan transportasi barang digunakan dalam analisis kebijakan transportasi agar tercipta pergerakan barang yang lancar (cepat), murah, aman, hemat energi dan ramah lingkungan, sehingga pelaku ekonomi dapat berkembang dan target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Data asal tujuan transportasi barang juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai dasar bagi perumusan kebijakan dari berbagai sektor.	Dimanfaatkan oleh Akademisi, Subsektor, K/L

NAMA APLIKASI/DATA	URAIAN	KETERANGAN
4. Data Terpilah	Data Terpilah merupakan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi gender, sehingga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.	Dimanfaatkan oleh Pusdatin, Kementerian PPA

Berdasarkan tabel daftar aplikasi dan data Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 di atas terdapat 14 aplikasi yang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2023, dari 14 aplikasi tersebut seluruhnya telah termanfaatkan oleh internal maupun eksternal sehingga realisasi untuk pemanfaatan aplikasi diperoleh sebesar 100% bila dikalikan dengan bobot 50% diperoleh realisasi sebesar 50% sedangkan untuk pemanfaatan data Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2023 sebesar 100% bila dikalikan dengan bobot 50% diperoleh realisasi sebesar 50%.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	100	100	100	93

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 18 pada tahun 2023 yaitu sebesar 100 telah melampaui target sebesar 92 sehingga capaian kinerjanya sebesar **108,70%**. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2023 sudah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Keberhasilan capaian pada indikator ini karena perencanaan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga seluruhnya termanfaatkan.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 18 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp766.208.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 766.203.371,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp4.629,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 50 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data		766.208.000	766.203.371	4.629	99,9994%
	Program Infrastruktur Konektivitas		766.208.000	766.203.371	4.629	99,9994%
	a. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi E-Survey Dalam Rangka Mendukung Survey Strategis Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	360.481.000	360.478.928	2.072	99,9994%
	b. Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi	1 Laporan	405.727.000	405.724.443	2.557	99,9994%

IKK 19: Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Merupakan perhitungan kinerja berdasarkan prosentase perumusan kebijakan yang dipublikasikan baik berupa media, media sosial jurnal, keterbukaan/ kemudahan akses informasi maupun kanal publikasi lainnya. Perhitungan realisasi untuk indikator ini menggunakan bobot dari setiap jenis publikasi yang telah dilakukan. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan penanggung jawab publikasi jurnal transportasi.

Selain melalui jurnal terakreditasi hasil rumusan kebijakan juga dapat dipublikasikan melalui *website*, media sosial, media massa, media cetak maupun *online*. Perhitungan untuk indikator ini menggunakan sistem bobot yang diberikan pada masing-masing jenis publikasi penelitian, yaitu:

- Website* dengan bobot 25%;
- Pelayanan Informasi dan Pengaduan dengan bobot 5%;
- Pemberitaan Media Massa dan Media Sosial dengan bobot 50%;
- Jurnal Transportasi dengan bobot 25%.

Berdasarkan skor pembobotan tersebut telah dilakukan perhitungan untuk realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi, yaitu:

Tabel 3. 51 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi

No	Indikator	Target Nilai		Bobot	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Website	100	konten	25%	61	12,20%
	Pelayanan Informasi dan Pengaduan	4	laporan		4	5,00%
2	Pemberitaan Media Massa	250	artikel	50%	258	20,48%
	Pengelolaan Media Sosial	380	konten		468	37,14%
3	Penerbitan Jurnal Transportasi	10	Artikel	25%	7	17,50%
Total				100%		92,32%

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi tahun 2023 dengan target 2023, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	92,32	70,73	97,53	75

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 19 pada tahun 2023 yaitu sebesar 92,32 telah melampaui target sebesar 75 sehingga capaian kinerjanya sebesar **123,09%**. Beberapa faktor keberhasilan pada indikator ini antara lain:

1. Penerbitan jurnal transportasi di Badan Kebijakan Transportasi memiliki reputasi yang baik dan diakui secara nasional (akreditasi Sinta 2 dan Sinta 3);
2. Tersedianya tim publikasi yang kreatif dalam pelaksanaan setiap kegiatan dari penyiapan bahan dan materi, proses pengolahan hingga menjadi publikasi yang menarik dan terkini;
3. Komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi maupun Lembaga lain dalam rangka informasi dan publikasi.

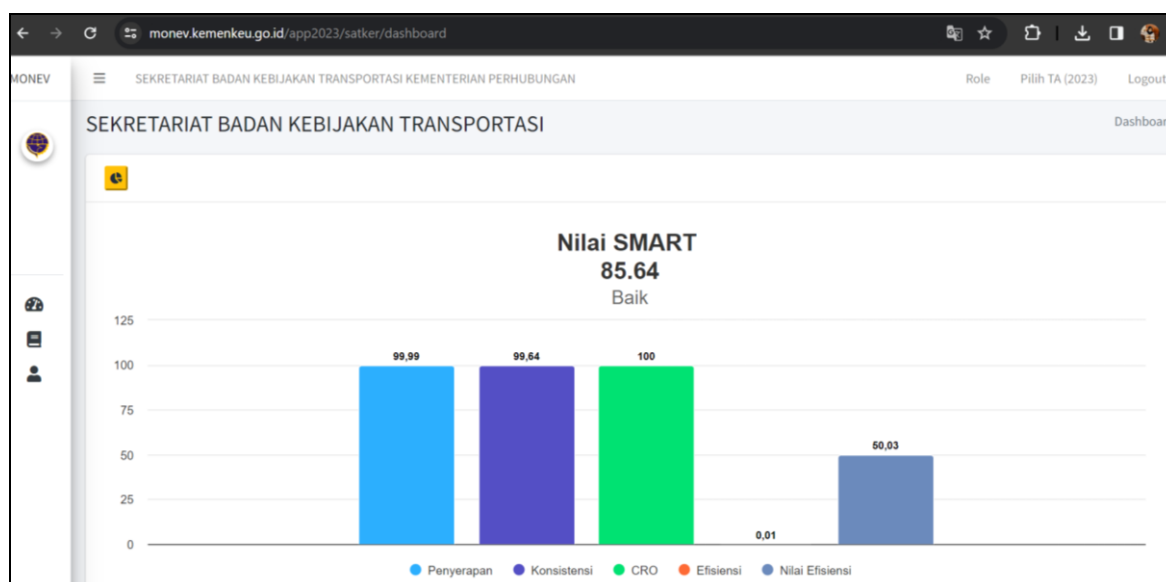
Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 19 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.937.229.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 1.937.218.203,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp10.797,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 53 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2023

IKK	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI 2023	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi		1.937.229.000	1.937.218.203	10.797	99,9994%
	Program Infrastruktur Konektivitas		1.937.229.000	1.937.218.203	10.797	99,9994%
	a. Penyelenggaraan Publikasi dan Koordinasi Peliputan Kegiatan Humas	1 Laporan	798.988.000	798.983.264	4.736	99,9994%
	b. Penyelenggaraan Media Relations	1 Laporan	237.790.000	237.789.938	62	100,0000%
	c. Pengelolaan Media Sosial	1 Laporan	117.275.000	117.273.409	1.591	99,9986%
	d. Penyelenggaraan Pengelolaan Publikasi Jurnal Transportasi	1 Laporan	645.138.000	645.135.560	2.440	99,9996%
	e. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	1 Laporan	66.895.000	66.894.127	873	99,9987%
	f. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	71.143.000	71.141.905	1.095	99,9985%

III.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dari segi anggaran, berdasarkan penilaian kinerja dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) milik Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan efisiensi anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk tahun 2023 adalah sebesar 0,03% dengan nilai kinerja 84,86%. Secara rinci penilaian kinerja pada aplikasi SMART dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Gambar 3. 6 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2023 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.02/2022 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK 02/ 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada peraturan terbaru mengatur tata cara pengukuran pada proses evaluasi kinerja, yang terdiri 5 (lima) indikator, dengan pengelompokan kategori Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk dalam kategori Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk dalam kategori Cukup;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk dalam kategori Kurang; dan
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Rincian perhitungan nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, adalah sebagai berikut:

1. Capaian Rincian Output (RO) Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

Tabel 3. 54 Target dan Realisasi Capaian Rincian *Output* Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

NO.	RINCIAN OUTPUT	VOLUME		(RVRO / TVRO) x 100%	CAPAIAN RO PER SATKER
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
1.	Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan	1	1	100%	100%
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100%	
3.	Layanan BMN	1	1	100%	
4.	Layanan Umum	1	1	100%	
5.	Layanan Perkantoran	1	1	100%	
6.	Layanan Sarana Internal	1	1	100%	
7.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%	
8.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%	
9.	Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%	
10.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%	
11.	Layanan Hubungan Masyarakat	1	1	100%	
12.	Layanan Hukum	1	1	100%	

$$CRO = \left(\left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \times \left(\frac{1}{1} \right) \right)^{\frac{1}{12}} \times 100\%$$

$$CRO = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas capaian RO Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2. Penyerapan Anggaran

Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 didapatkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:
P : penyerapan anggaran
RA : realisasi anggaran
AA : alokasi anggaran

Tabel 3. 55 Tingkat Penyerapan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 per Bulan

NO	BULAN	RPD (Rp,-)	REALISASI ANGGARAN (Rp,-)	TINGKAT PENYERAPAN
1	Januari	3.295.099.713	3.295.099.721	4,40%
2	Februari	6.753.526.448	6.753.526.455	13,42%
3	Maret	5.484.966.085	5.484.966.087	20,75%
4	April	9.053.973.134	9.053.973.146	32,85%
5	Mei	5.513.612.640	5.513.612.645	40,21%
6	Juni	6.341.060.043	6.341.060.043	48,68%
7	Juli	6.055.724.460	6.055.724.470	56,77%
8	Agustus	5.636.810.638	5.636.810.644	64,30%
9	September	6.131.905.754	6.131.905.762	72,50%
10	Oktober	7.422.230.984	6.710.877.820	81,46%
11	November	7.195.283.363	5.732.493.518	89,12%
12	Desember	5.970.324.738	8.135.283.153	99,99%
TOTAL		74.854.518.000	74.845.333.464	99,99%

*Sumber: Aplikasi SMART (<http://smart.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,99%.

3. Analisis Efisiensi Tingkat Satuan Kinerja

Formula penghitungan efisisensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:
 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AARO_i$: alokasi anggaran RO i
 $RARO_i$: realisasi anggaran RO i
 CRO_i : capaian RO i

Tabel 3. 56 Perhitungan Skalia Efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

NO.	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	CRO PER KRO (%)	ALOKASI ANGGARAN (AAKRO)	REALISASI ANGGARAN (RAKRO)	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (3)	(7) = (6) - (5)
1	Koordinasi	100	11.190.158.000	11.190.122.516	11.190.158.000	35.484
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100	3.772.426.000	3.772.425.110	3.772.426.000	890
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	432.578.000	432.577.135	432.578.000	865
4	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	301.704.000	301.702.589	301.704.000	1.411
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	2.284.026.000	2.284.013.494	2.284.026.000	12.506
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	54.509.220.000	54.500.114.564	54.509.220.000	9.105.436
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	100	2.364.406.000	2.364.378.056	2.364.406.000	27.944
JUMLAH			74.854.518.000	74.845.333.464	74.854.518.000	9.184.536
<i>Efisiensi RO Satker</i> = $\frac{\sum(7)}{\sum(4)} \times 100\%$					0,01%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Persentase Efisiensi Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,01%. Untuk mendapatkan Nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian *output*, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu 0% s.d. 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0% s.d. 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% s.d. 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,01}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50,03\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Nilai Efisiensi Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 50,03%.

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:
 K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n
 RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
 n : jumlah bulan

Tabel 3. 57 Rencana Penarikan Dana Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 per Bulan

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KUMULATIF
1	Januari	3.295.099.713	3.295.099.713	3.295.099.721	3.295.099.721
2	Februari	6.753.526.448	10.048.626.161	6.753.526.455	10.048.626.176
3	Maret	5.484.966.085	15.533.592.246	5.484.966.087	15.533.592.263
4	April	9.053.973.134	24.587.565.380	9.053.973.146	24.587.565.409
5	Mei	5.513.612.640	30.101.178.020	5.513.612.645	30.101.178.054
6	Juni	6.341.060.043	36.442.238.063	6.341.060.043	36.442.238.097
7	Juli	6.055.724.460	42.497.962.523	6.055.724.470	42.497.962.567
8	Agustus	5.636.810.638	48.134.773.161	5.636.810.644	48.134.773.211
9	September	6.131.905.754	54.266.678.915	6.131.905.762	54.266.678.973
10	Oktober	7.422.230.984	61.688.909.899	6.710.877.820	60.977.556.793
11	November	7.195.283.363	68.884.193.262	5.732.493.518	66.710.050.311
12	Desember	5.970.324.738	74.854.518.000	8.135.283.153	74.845.333.464

*Sumber: Aplikasi SMART (<http://smart.kemenkeu.go.id>)

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai konsistensi untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 58 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2023

NO	BULAN	TINGKAT KONSISTENSI PER BULAN
(1)	(2)	(3)
1	Januari	100,000%
2	Februari	100,000%
3	Maret	100,000%
4	April	100,000%
5	Mei	100,000%
6	Juni	100,000%
7	Juli	100,000%
8	Agustus	100,000%
9	September	100,000%
10	Oktober	99,885%
11	November	99,608%
12	Desember	99,640%
<i>Konsistensi Penyerapan</i> = $\frac{\Sigma(3)}{12}$		99,93%

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,93%.

5. Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja sama dengan cara perhitungan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja dengan rumus sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan

NKI	: Nilai kinerja atas aspek implementasi
P	: Penyerapan anggaran
K	: Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
COP	: Capaian output program
CRO	: Capaian RO
NE	: Nilai efisiensi unit Eselon I atau Satuan Kerja
W _P	: Bobot penyerapan anggaran
W _K	: Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
W _{COP}	: Bobot capaian Output Program
W _{CRO}	: Bobot capaian RO
W _E	: Bobot Efisiensi

Bobot masing-masing variable aspek implementasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} WP &= 9,7\% \\ WK &= 18,2\% \\ W_{COP} &= W_{CRO} = 43,5\% \\ W_E &= 28,6\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 59 Nilai Variabel Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

PENYERAPAN ANGGARAN (P)	KONSITENSI PENYERAPAN (K)	CAPAIAN RO (CRO)	NILAI EFISIENSI (NE)
99,988%	99,64%	100,00%	50,03%

$$NKA = (99,988 \times 9,7\%) + (99,64 \times 18,2\%) + (100 \times 43,5\%) + (50,03 \times 28,6\%)$$

$$NKA = 85,64$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 85,64%.

III.2.2. CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Sebagai unit kerja pendukung kegiatan utama Badan Kebijakan Transportasi, sepanjang tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi senantiasa berusaha memberikan dukungan layanan manajemen dan manajemen teknis lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Beberapa capaian keberhasilan lainnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi di Tahun 2023 antara lain:

1. Predikat informatif pada Anugerah Standar Layanan Informasi Publik 2023

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mempertahankan predikat sebagai badan publik yang informatif, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan penganugerahan penghargaan kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Badan Kebijakan Transportasi meraih Predikat informatif pada Anugerah Standar Layanan Informasi Publik Tingkat PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Eselon II dengan Nilai 96. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Bapak Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si dan diberikan oleh Menteri Perhubungan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan.



Gambar 3. 7 Penerimaan Penghargaan Anugerah Standar Layanan Informasi Publik 2023 oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Bapak Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si

2. Peringkat III SAKIP Award Kategori Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan SAKIP Award sebagai bentuk apresiasi/penghargaan atas capaian kinerja dan implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2023 yang telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan mengevaluasi kinerja secara berkala serta menjalankan program kegiatan dengan efektif dan efisien. Penganugerahan SAKIP Award Eselon II berdasarkan monitoring dan pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi *E-performance*.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berhasil menjadi peringkat ke-3 dari 57 Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan nilai 82,16. Penilaian SAKIP Award ini merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022.



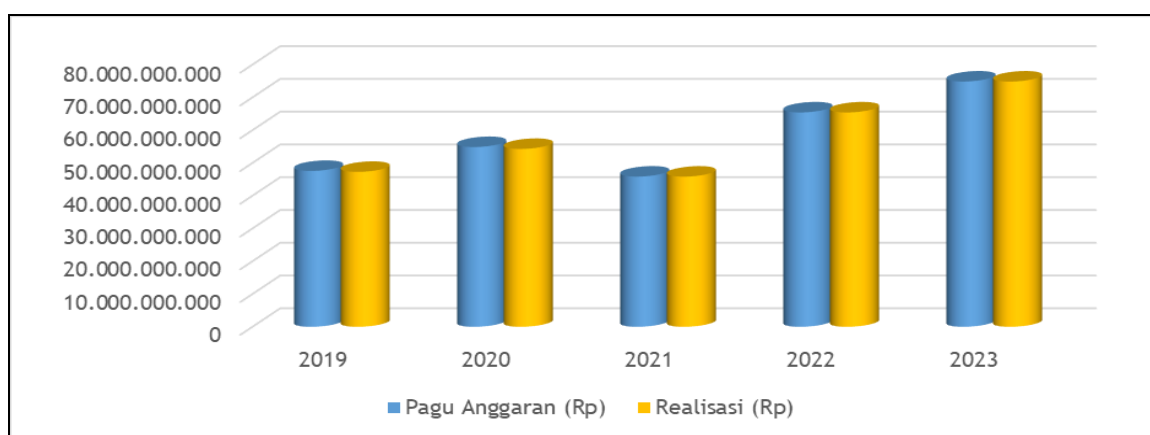
Gambar 3. 8 Peringkat 3 Besar Penganugerahan SAKIP Award 2023 Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan

III.4. REALISASI ANGGARAN

Perkembangan pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama rentang waktu tahun 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

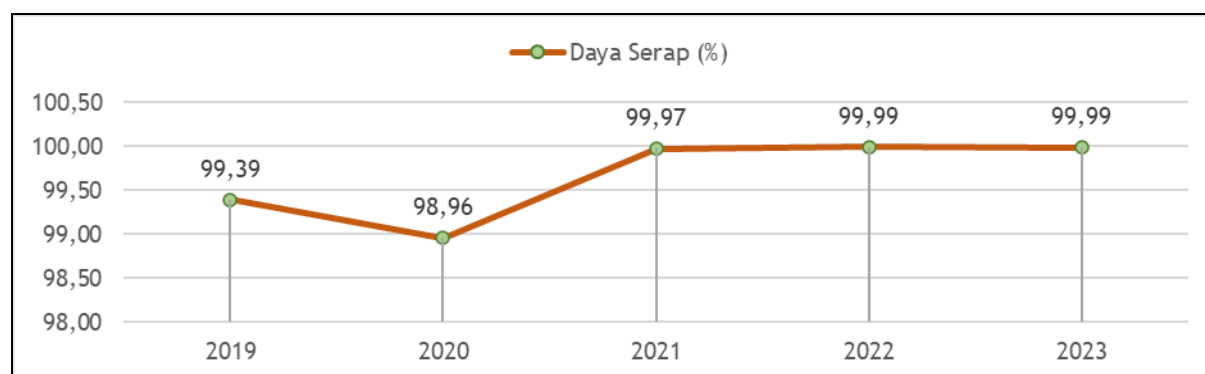
Tabel 3. 60 Perkembangan Anggaran Tahun 2018-2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2019	47.569.996.000	47.281.079.874	99,39
2020	54,858,322,000	54,286,203,925	98.96
2021	45.843.217.000	45.831.591.266	99,97
2022	65.421.497.000	65.417.377.424	99,99
2023	74.845.333.464	74.854.518.000	99,99



Gambar 3. 9 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2019 – 2023

Selama kurun waktu lima tahun pagu anggaran tertinggi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp74.854.518.000.- dan telah terealisasi sebesar Rp74.845.333.464,- atau 99,99% dari total rencana anggaran (DIPA) yang merupakan realisasi tertinggi selama kurun waktu tersebut. Secara rinci perkembangan daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada Gambar 3.11. di bawah ini:

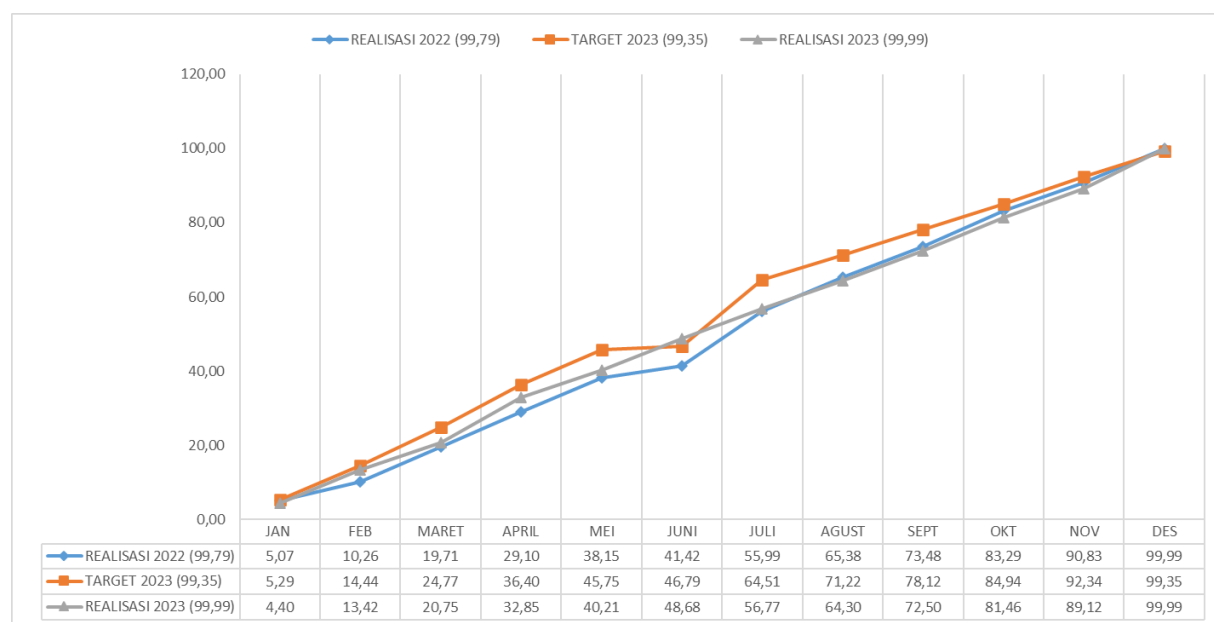


Gambar 3. 10 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2019-2023

Penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 sama optimalnya dengan dengan realisasi anggaran di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2023 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp75.642.991.000,-. Pada bulan November dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2023 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 menjadi sebesar Rp74.854.518.000,-. Setelah pengesahan realokasi anggaran ke Babun, DIPA akhir Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp74.854.518.000,-. Rincian anggaran meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 34.805.083.000,-, belanja barang Rp 36.277.009.000,-, dan belanja modal sebesar Rp 3.772.426.000,-.

Penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 74.845.333.464,- (99,99%), dengan rincian realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp 34.796.038.240,- (99,97%), belanja barang sebesar Rp 36.276.870.114,- (100%), belanja modal Rp3.772.425.110,- (100%). Berikut gambar grafik perbandingan rencana penarikan dana revisi akhir dengan realisasi keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023:



Gambar 3. 11 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

III.3.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 perolehan pagu anggaran revisi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar Rp74.854.518.000,- dan direncanakan target daya serap sebesar 99,35% dengan realisasi daya serap anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebesar 99,99%. Kondisi pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.18. di bawah ini:

Tabel 3. 61 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2023

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp,-)
Belanja Pegawai	34.805.083.000
Belanja Barang	36.277.009.000
Belanja Modal	3.772.426.000
Total	74.854.518.000

Sumber: Bagian Keuangan dan BMN, 2023

III.3.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap Tahun 2023

Capaian daya serap anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 tercatat sebesar 99,99% atau Rp65.417.377.424,- dan sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp4.119.576,- (0,006%). Realisasi daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 62 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2020

JENIS BELANJA	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	PENYERAPAN
Belanja Pegawai	34.805.083.000	34.796.038.240	99,97%
Belanja Barang	36.277.009.000	36.276.870.114	100,00%
Belanja Modal	3.772.426.000	3.772.425.110	100,00%
Total	74.854.518.000	74.845.333.464	99,99%

Sumber: Bagian Keuangan dan BMN, 2023

Secara lengkap perkembangan pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi termasuk realisasi dan penyerapannya berdasarkan output kegiatan disajikan dalam Matriks Laporan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 pada **Lampiran II**.

III.3.3. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Tahun 2023

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2023 dalam mendukung ketercapaian IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, secara rinci dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3. 63 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			
	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	SISA (Rp,-)	PROSENTASE REALISASI
IKK 5	719.377.000	719.373.818	3.182	100,00
IKK 6	357.854.000	357.852.000	2.000	100,00
IKK 7	1.624.928.000	1.624.918.428	9.572	100,00
IKK 8	38.547.582.000	38.541.180.498	6.401.502	99,98
IKK 9	677.264.000	677.261.320	2.680	100,00
IKK 10	4.324.964.000	4.324.960.941	3.059	100,00
IKK 11	704.781.000	704.779.315	1.685	100,00
IKK 12	19.151.599.000	19.151.540.493	58.507	100,00
IKK 13	599.330.000	599.328.039	1.961	100,00
IKK 14	646.008.000	646.002.583	5.417	100,00
IKK 15	2.112.760.000	2.112.754.538	5.462	100,00
IKK 16	2.252.056.000	1.984.759.600	267.296.400	88,13
IKK 17	432.578.000	432.577.135	865	100,00
IKK 18	766.208.000	766.203.371	4.629	100,00
IKK 19	1.937.229.000	1.937.218.203	10.797	100,00

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi kepada Badan Kebijakan Transportasi atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kebijakan Transportasi dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Secara umum pencapaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Seluruh indikator kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah melampaui target sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi I Tahun 2023. Pencapaian rata-rata Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 untuk 15 indikator kinerja kegiatan, yaitu sebesar **135,26%**.

IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2023, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi secara dinamis telah melakukan perbaikan dengan mengedepankan koordinasi yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Beberapa identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti penatausahaan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/ integral dengan proses kegiatan lainnya;
3. Perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi;
4. Menyusun ulang seluruh proses bisnis dalam bentuk SOP meliputi kegiatan kebijakan dan kegiatan dukungan manajemen;
5. Menyusun sistem kerja baru sesuai Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 sehingga memberikan kejelasan kewenangan dari setiap jabatan serta lingkup tanggung jawabnya masing-masing melalui pelaksanaan pekerjaan oleh kelompok kerja;
6. Di setiap persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu melakukan perencanaan penyusunan target kegiatan dan anggaran yang lebih baik dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan apabila terjadi kebutuhan revisi DIPA yang akan mempengaruhi capaian dan kualitas kinerja program.

L A M P I R A N

Lampiran 1

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023**

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2023				CAPAIAN KINERJA
						TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
Terwujudnya peran sentral Sekretariat Badan dalam peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan	%	100	22,22	44,44	72,22	100	100,00%
	SK 3 Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3,00	3	3	3	100,00%
		IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84	100,00	100	100	100	119,05%
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2	41,70	53,07	45,90	90,50	102,61%
		IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	82,46	82,46	80,80	80,80	99,75%
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	76	25,00	25	100	100,00	131,58%
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86	50,00	50	100	100	116,28%
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	76,44	80,77	80,30	78,94	108,14%

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2023				CAPAIAN KINERJA
						TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95	58,75	87,50	116,25	125	131,58%
	SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5	0	0	75,59	75,59	95,08%
		IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74	81,76	81,76	81,76	75,04	101,41%
		IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,93	0,93	0,93	0,96	100,00%
	SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	96,30	188	311	368,70	491,60%
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	100,0	100	100	100	108,70%
		IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	27,37	48,76	69,11	92,32	123,09%

Lampiran 2

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024**

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA 2024	TARGET PK 2024	REALISASI KINERJA			
							2020	2021	2022	2023
Terwujudnya peran sentral Sekretariat Badan dalam peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan	%	100	100	-	-	-	100,00
	SK 3 Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3,00	3,00	3,00	3,00
		IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	85	85	100,00	100,00	100,00	100,00
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	90,2	90,2	93,71	87,85	92,28	90,50
		IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	82	81	-	-	-	80,80
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	77	77	58,8	76,25	76,80	100,00
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	87	87	100,00	100,00	100,00	100,00
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	74	74	-	78,92	76,44	78,94

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA 2024	TARGET PK 2024	REALISASI KINERJA			
							2020	2021	2022	2023
	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	100	100	-	-	-	125,00
	SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	80	75	80,52	-	-	75,59
		IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	75	75	82,23	82,60	81,76	75,04
		IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	1	1	0,92	0,93	0,93	0,96
	SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	100	-	-	-	368,70
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	93	93	100,00	100,00	100,00	100,00
		IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	75	99,83	97,53	70,73	92,32

Lampiran 3

**REKAPITULASI REALISASI DAYA SERAP SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
TRIWULAN I (PERIODE: JANUARI S/D MARET) TAHUN 2023													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	35.536.273.000	8.760.730.821	24,65%	37.531.132.000	7.410.830.450	19,75%	2.575.586.000	773.700.000	30,04%	75.642.991.000	16.945.261.271	22,40%
TRIWULAN II (PERIODE: APRIL S/D JUNI) TAHUN 2023													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	35.536.273.000	12.962.544.725	36,48%	37.531.132.000	7.913.834.343	21,09%	2.575.586.000	1.476.400.000	57,32%	75.642.991.000	22.352.779.068	29,55%
TRIWULAN III (PERIODE: JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2023													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	35.536.273.000	26.874.030.902	75,62%	36.334.292.000	24.364.485.321	67,06%	3.772.426.000	3.028.162.750	80,27%	75.642.991.000	54.266.678.973	71,74%
TRIWULAN IV (PERIODE: OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN 2023													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	34.805.083.000	34.796.038.240	99,97%	36.277.009.000	36.276.870.114	100,00%	3.772.426.000	3.772.425.110	100,00%	74.854.518.000	74.845.333.464	99,99%